

LAPORAN PENELITIAN DOSEN PEMULA



MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

PERILAKU POLITIK ELIT MUHAMMADIYAH KOTA
PADANGPANJANG

Oleh :

Adil Mubarak, S.IP, M.Si (Ketua)

Penelitian ini dibiayai oleh :

Dana DIPA Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNP No. 422/UN35.2/PG/2012
Tanggal 25 Juli 2012

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
November, 2012

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
PITERIMA TGL	16 April 2014
SUMBER/HARGA:	Hd
KOLEKSI	. FI
NO. INVENTARIS	755/Hd/2014 - p.1 (1)
KLASIFIKASI	

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN PEMULA**

1. Judul Penelitian : Perilaku Politik Elit Muhammadiyah Kota Padang panjang
2. Bidang Penelitian : Ilmu Politik (Sosial Humaniora)
3. Ketua Penelitian
- a. Nama Lengkap : Adil Mubarak, S.IP,M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19790108 200912 1 003
 - d. Disiplin Ilmu : Ilmu Politik
 - e. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I/III.b
 - f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - g. Fakultas/Jurusan : Ilmu Sosial/Ilmu Sosial Politik
 - h. Alamat : Jl.Prof. DR.Hamka Air Tawar Padang
 - i. HP/E-mail : 08122778735/adilmubarak08@yahoo.co.id
 - j. Alamat Rumah : Jl.Ikhlis XIII No.13 Andalas Kota Padang
 - k. Telepon : 0751-38168
4. Jumlah Anggota Peneliti : 2 Orang
Nama Anggota : 1. Boni Saputra
2. Betty Gusmida
5. Lokasi Penelitian : Kota Padang Panjang
6. Jumlah Biaya Yang diusulkan : Rp.7.500.000
Terbilang : Tujuh juta lima ratus ribu rupiah

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas negeri Padang

Prof.DR. Syafri Anwar, M.Pd
NIP: 19621001 198903 1 002

Padang, 22 November 2012
Ketua Peneliti



Adil Mubarak, S.IP,M.Si
NIP :19790108 200912 1 003

Menyetujui:

Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang



Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP: 19610722 198602 1 002

**LEMBARAN PENGESAHAN IDENTITAS
LAPORAN PENELITIAN DOSEN PEMULA**

1. a. Judul Penelitian : Perilaku Politik Elit Muhammadiyah Kota Padang panjang
b. Bidang Ilmu : Ilmu Politik

2. Personalia
 - a. Ketua Peneliti
Nama : Adil Mubarak, S.IP, M.Si
Pangkat/Golongan/NIP : Penata Muda Tk.I/III.b/ 19790108 2009121003
Fakultas/Jurusan : FIS/Ilmu Sosial Politik
 - b. Anggota Peneliti 1
Nama : Boni Saputra
NIM :16097/2010
 - c. Anggota Peneliti 2
Nama : Betty Gusmida
NIM : 16098/2010

3. Usul Penelitian : Telah direvisi sesuai dengan saran pembahas

Padang, November 2010

Pembahas I,



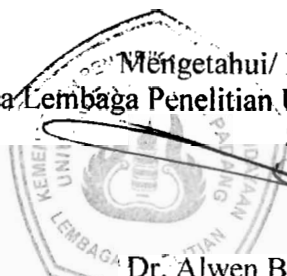
Prof. Drs. Dasman Lanin, M.Pd Ph.D
NIP :195704161986021001

Pembahas II,



Afriva Khaidir, SH, M.H.MAPA, Ph.D
NIP :196604111990031002

Mengetahui/ Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang



Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP.196107221986021002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik perilaku politik elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang dalam partisipasi para elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang tersebut disetiap tahap kebijakan Pemerintah Kota Padang Panjang. Perilaku Politik dalam konteks ini juga menggambarkan hubungan elit Muhammadiyah dengan partai politik dan apa-apa saja yang mendorong perilaku politik elit Muhammadiyah tersebut.

Ada dua karakteristik perilaku elit Muhammadiyah dalam hubungannya dengan kekuasaan yaitu (1), Kooperatif-kritis dan (2), Kooperatif-Akomodatif. Temuan penelitian, karakteristik perilaku politik elit Muhammadiyah di Kota Padang Panjang lebih cenderung mengarah pada pola kooperatif akomodatif yang diperlihatkan dari pola kerjasama Muhammadiyah dan pemerintah yang cenderung sejalan, harmonis, dan nyaris tanpa intrik dan kritik terhadap kekuasaan.

Kaitannya dengan partai politik ada dua faktor mendasar dari para elit yang cukup mempengaruhi mereka dalam berinteraksi dengan beberapa parpol yaitu faktor identitas primordial dan faktor personal.

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian yang dipakai adalah study kasus terpancang (*embedded case study*) disini fokus atau tujuan utama dari penelitian ditentukan terlebih dahulu sebelum peneliti terjun ke lapangan sehingga peneliti tetap terfokus pada masalah yang telah dirumuskan dan penelitian tidak berubah arah sehingga desain asli tetap dengan pertanyaan pertanyaan yang telah dirumuskan pada awal penelitian.

Kata Kunci : *Perilaku Politik, Elit Pimpinan, Kooperatif-akomodatif*

PENGANTAR

Kegiatan penelitian mendukung pengembangan ilmu serta terapannya. Dalam hal ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan mengajarnya, baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait.

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang bekerjasama dengan Pimpinan Universitas, telah memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian tentang *Perilaku Politik Elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang*, sesuai dengan Surat Penugasan Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran 2012 Nomor: 418/UN35.2/PG/2012 Tanggal 25 Juli 2012.

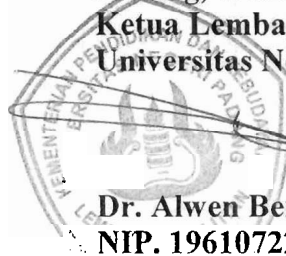
Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang akan dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan.

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, kemudian untuk tujuan diseminasi, hasil penelitian ini telah diseminarkan ditingkat Universitas. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pada umumnya dan khususnya peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri Padang.

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu terlaksananya penelitian ini, terutama kepada pimpinan lembaga terkait yang menjadi objek penelitian, responden yang menjadi sampel penelitian, dan tim perievi Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Negeri Padang yang telah berkenan memberi bantuan pendanaan bagi penelitian ini. Kami yakin tanpa dedikasi dan kerjasama yang terjalin selama ini, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan dan semoga kerjasama yang baik ini akan menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Terima kasih.

Padang, Desember 2012
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,



Dr. Alwen Bentri, M.Pd.
NIP. 19610722 198602 1 002

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Laporan Penelitian	i
Lembaran Pengesahan Identitas Penelitian	ii
Abstrak	iii
Pengantar	iv
Daftar Lampiran	v
Daftar Tabel	vi
Bab. I. Pendahuluan	
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah	4
C.Tujuan Penelitian	5
D.Manfaat Penelitian	5
Bab. II. Tinjauan Pustaka	
A. Muhammadiyah Dan Politik	6
B.Perilaku Politik	14
C.Elit Muhammadiyah	16
D.Budaya Politik Muhammadiyah	19
Bab. III. Tujuan Luaran dan Kontribusi Penelitian	20
Bab. IV. Metode Penelitian	
A.Jenis Penelitian	21
B.Teknik Pengumpulan Data	23
C.Subjek Penelitian	23
D.Analisis Data	24
Bab. V. Hasil dan Pembahasan	
A.Deskripsi Tentang Elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang	26
B.Program kerja PD.Muhammadiyah Kota Padang Panjang yang berhubungan dengan Politik	33
C.Deskriptif Tentang Hubungan Elit Muhammadiyah Kota Padangpanjang dengan Kekuasaan	36
D.Deskripsi Tentang Hubungan Elit Muhammadiyah Dengan Partai Politik	40
E.Karakteristik dan Faktor Pendorong Perilaku Elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang	43
Bab. VI .Kesimpulan dan Saran	
A.Kesimpulan	49
B.Saran	47
Daftar Pustaka	50
Lampiran-lampiran	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Rekomendasi tentang izin melaksanakan penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintahan Kota Padang Panjang
2. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuah X Kota Periode 2010-2015
3. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang Panjang Tentang Struktur Pimpinan Harian PD Muhammadiyah Kota Padang Panjang Batipuah X Kota Periode 2010-2015
4. Daftar Wawancara
5. Dokumentasi Foto Di Lokasi Penelitian.

DAFTAR TABEL

1. Tabel.2.1 Hubungan antara orientasi terhadap sistem politik dengan budaya politik
2. Tabel : V.1. Pembagian Tugas dan Jabatan 13 Orang Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Periode 2010-2015
3. Tabel. V.2. MAJLIS TARJIH DAN TAJDID
4. Tabel. V.3. MAJLIS TABLIH DAN DAKWAH KHUSUS
5. Tabel.V.4. MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
6. Tabel.V.5. MAJLIS EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
7. Tabel. V.6. MAJLIS PELAYANAN SOSIAL DAN KESEHATAN
8. Tabel.V.7. MAJLIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satu agenda penting yang hingga saat ini masih saja aktual untuk diperdebatkan oleh warga Muhammadiyah adalah tentang konsep politik Muhammadiyah. Yakni, semacam *frame worke* yang dapat dijadikan patokan perilaku lembaga ini dalam menentukan posisinya di tengah konstelasi politik nasional maupun di tingkat lokal. Antara keinginan untuk terjun dalam politik praktis dan keinginan lain yang justru sebaliknya, yakni menjaga jarak dengan politik praktis. Para elit pimpinan Perserikatan ini sering melontarkan pernyataan mengenai perlu dilakukannya usaha-usaha yang tegas untuk dapat menjaga jarak dengan permainan politik praktis (Sunaryo: 2000:88)

Namun Sebenarnya, perdebatan itu bisa *clear* dengan hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah Ujung Pandang tahun 1971 yang menjelaskan bahwa Muhammadiyah secara organisatoris tidak berafiliasi dengan partai politik manapun namun memberikan kebebasan kepada kadernya untuk bergabung dengan partai politik untuk kepentingan umat. Keputusan ini menegaskan dengan sangat jelas posisi Muhammadiyah dalam hubungannya dengan politik.

Pasca Muktamar Ujung Pandang tahun 1971 hingga sekarang, dan mungkin untuk seterusnya, Muhammadiyah berusaha untuk tetap konsisten berada di jalur gerakan kultural sebagai organisasi keagamaan yang punya agenda dakwah melalui berbagai macam amal usaha diberbagai bidang.

Implikasi dari keputusan Muktamar di Ujung Pandang tersebut akhirnya justru menjadikan Muhammadiyah lebih agresif dan *responsive* dalam menyikapi kenyataan politik di Negara ini, melalui kader-kader Muhammadiyah yang potensial Muhammadiyah berhasil menyeruak masuk hampir disemua lini politik baik Nasional maupun politik ditingkat lokal. Bisa

dipastikan apapun perkembangannya dalam konteks politik di negeri ini Muhammadiyah selalu menjadi ujung tombak.

Sejarah perjalanan Muhammadiyah dengan politik di Indonesia sudah dimulai sejak masa penjajahan, sebagai sebuah organisasi pembaharu yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan Muhammadiyah selalu berperan aktif dalam setiap *moment* politik penting. Dimasa menjelang kemerdekaan Muhammadiyah juga ikut serta merumuskan dan mempersiapkan kemerdekaan, hingga saat ini di era reformasi terlihat secara jelas betapa Muhammadiyah dan konstelasi politik Indonesia tidak terlepas.

Peran dan dinamika Muhammadiyah dalam konteks politik ini tidak hanya berada dalam pentas ditingkat nasional, kecenderungan perilaku dan budaya politik Muhammadiyah ini tentu menjalar sampai ke tingkat lokal yaitu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ke tingkat ranting. Ada asumsi bahwa para Pimpinan Muhammadiyah di tiap tingkat itu sangat menyadari sekali bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah perserikatan besar telah menjadi sumber daya yang akan diperhitungkan

Sumatera Barat merupakan sebuah propinsi yang menjadi basis Muhammadiyah, lebih khusus kota Padang Panjang. Ada sebuah istilah yang sangat populer bagi kalangan Muhammadiyah yaitu “Muhammadiyah di lahirkan di Kauman Yogyakarta dan di besarkan di kauman Padangpanjang”. Muhammadiyah Kota Padangpanjang akhirnya menjadi barometer keberadaan Muhammadiyah di Sumatera Barat pada khususnya bahkan Muhammadiyah secara Nasional umumnya. Hal ini dirasa tidak terlalu berlebihan karena secara empirik memang banyak pemimpin Muhammadiyah dengan nama besarnya berasal dari kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Perguruan Kauman Padangpanjang yang didirikan oleh Buya HAMKA tersebut telah banyak melahirkan kader Muhammadiyah yang akhirnya menjadi pengurus

Muhammadiyah di beberapa wilayah di Negara ini, makanya sampai hari ini Perguruan Kauman Muhammadiyah Padangpanjang disebut dengan sekolah kader.

Pengaruh dan nama besar inilah yang menyebabkan Muhammadiyah Padangpanjang menjadi Ormas yang penting dan diperhitungkan dalam berbagai aspek termasuk dalam hal politik, sejauh ini diketahui bahwa ada hubungan secara emosional antara Wali Kota Padangpanjang dengan Muhammadiyah Padangpanjang, atau sampai hari ini terhitung sangat banyak pemimpin dan kader Muhammadiyah yang berafiliasi ke berbagai partai politik, sebut saja misalnya Buya Hamidi yang pernah menjabat ketua DPRD kota Padangpanjang dan ada beberapa nama yang memang mereka dikategorikan sebagai elit Muhammadiyah Padangpanjang yang berhasil menjadi anggota DPRD. Belum lagi, peran Muhammadiyah Kota Padangpanjang terkait dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal inilah akhirnya yang mencuri perhatian peneliti untuk lebih dalam bisa menggambarkan perilaku politik elit Muhammadiyah Kota Padangpanjang antara tahun 2005-2012.

Kemudian dari sisi yang lain, Kota Padang Panjang saat ini secara politik termasuk kategori daerah dengan suhu politik yang cukup tinggi karena Kota ini dalam beberapa bulan kedepan tepatnya di tahun 2013 akan menyelenggarakan pesta demokrasi yaitu pemilihan umum kepala daerah (pemilikada).

Telah banyak terlihat aktivitas-aktivitas politik yang dimainkan oleh pada calon kandidat kepala daerah yang berminat untuk berkompetisi diperhelatan ini, di observasi awal peneliti melihat banyak indikasi yang mengarah pada adanya keterlibatan para elit pimpinan Muhammadiyah Kota Padangpanjang dalam konstelasi pemilukada ini. Ini disebabkan karena antara lain sebagian calon yang menggapung merupakan kader-kader Muhammadiyah yang

berharap akan mendulang suara dari konstituen Muhammadiyah Kota Padang Panjang yang diperikrakan menjadi mayoritas suara pemilih.

Pengalaman pemilu pada sebelumnya, Walikota saat ini dapat meraih kursi nomor satu di Kota Padang Panjang dikarenakan dukungan warga Muhammadiyah yang hampir merata disetiap kecamatan yang ada di Kota Padang Panjang. Oleh karena itu meneliti perilaku elit pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang saat ini menjadi ketertarikan tersendiri bagi peneliti.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, yaitu :

1. **Apa** karakteristik sikap dan perilaku politik elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong perilaku politik elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang
3. Bagaimana dampak perilaku politik elit Muhammadiyah kota Padang Panjang tersebut terhadap perserikatan (Muhammadiyah)

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah:

- 1) Untuk mendeskripsikan pola/karakteristik perilaku politik elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang
- 2) Untuk mengetahui faktor apa yang mendorong perilaku politik elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang
- 3) Dan untuk menggambarkan dampak dari perilaku politik elit tersebut terhadap dinamika perserikatan

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini secara akademik tentu akan bermanfaat dalam pengayaan disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora lebih khusus berkontribusi pada pengembangan kajian studi Ilmu politik.
2. Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan organisasi khususnya Muhammadiyah Kota Padang Panjang dalam mencari format perilaku politik dalam hubungannya dengan penguasa yang berdampak positif bagi kinerja perserikatan/organisasi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Muhammadiyah dan Politik

Indonesia adalah Negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan Negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia meskipun secara resmi bukan Negara islam.¹ Dari 241² juta lebih penduduk Indonesia pada tahun 2011, 85-90% diantaranya adalah muslim secara nominal. Dengan demikian jika dikaitkan dengan politik, Islam menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan apabila ingin memahami politik Indonesia. Logika yang dipakai cukup sederhana, Umat Islam Indonesia adalah mayoritas sehingga kebijakan Negara tidak akan berhasil kalau mengesampingkan umat Islam.

Sementara itu, ketika hendak berbicara tentang Islam dan Umat Islam di Indonesia asosiasi kita akan mengarah pada dua organisasi islam yang cukup berpengaruh yaitu Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), dua organisasi Islam ini merupakan presentasi dari umat Islam secara keseluruhan, karena masing-masing memiliki massa yang besar dari dua kutub yang berlainan. Muhammadiyah mewakili kutub modernis atau reformis sebaliknya NU mewakili kutub tradisionalis (R. William Lidle : 1996: 73) . Muhammadiyah basis masyarakatnya berada di perkotaan sementara NU berbasis pedesaan, agraris dan pesantren yang banyak menghasilkan ulama-ulama ternama. Muhammadiyah lebih dikenal banyak menelorkan kaum intelektual karena menjamurnya amal usaha bidang pendidikan mulai dari TK sampai ke tingkat perguruan tinggi.

Penelitian ini terfokus hanya pada Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang sesuai perkembangan pada akhirnya mengarah ke salah satu bentuk kelompok

¹ <http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia> (diakses pada tanggal 27-02-2012)

² Demikian dikatakan Sekretaris Utama BKKBN Sudibyo Alimoeso, di Jakarta, Selasa 5 Juli 2011 di REPUBLIKA.CO.ID

kepentingan (*interest group*) sehingga menjadi satu kekuatan politik yang harus diperhitungkan terkait *maneuver* dan *move-move* politiknya dalam berbagai konstelasi politik di Negara ini.

Muhammadiyah yang didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1912, tepatnya tanggal 18 November (8 Zulhijah 1330 H) di Kauman Jogjakarta pada hakekatnya bukanlah organisasi politik namun walaupun demikian secara historis sejak lahir sampai hari ini hingga Muhammadiyah berumur satu abad tidak pernah absen dari pergumulan dan pergulatan dengan persoalan kebangsaan (M. Amin Rais : 1997:15). Taufik Abdullah menyatakan bahwa Muhammadiyah hanya mungkin dapat dipahami kalau sejarahnya ditempatkan dalam konteks dinamika hubungan masyarakat dan Negara di tanah air. Artinya bahwa Muhammadiyah benar-benar tidak bisa dilepaskan sama sekali dengan perjalanan politik di Indonesia (Sudarno Shabron : 2003 : 63).

(Sudarno Shabron : 2003 : 65) menjelaskan bahwa Sejarah keterlibatan Muhammadiyah dalam pergerakan nasional diawali tahun 1918, Muhammadiyah mendirikan kepanduan yang diberi nama Hizbul Wathon (HW) yang artinya pembela tanah air. Dalam kepanduan HW ini K.H Ahmad Dahlan menanamkan kesadaran berbangsa dan semangat cinta tanah air kepada para anggota perserikatan dan pada akhirnya menumbuhkan empati yang begitu kuat terhadap persoalan-persoalan Negara pada saat itu.

Tahun 1937 pada masa pendudukan Belanda kiprah Muhammadiyah terkait masalah bangsa dan masyarakat berlanjut dengan berbagai macam agenda-agenda penting yang menjadi pijakan sejarah bangsa menuju perubahan, KH.Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan K.H. Mas Mansur tokoh Muhammadiyah bersama tokoh NU dan Ormas Islam lainnya mendirikan Majelis Islam Ala Indonesia (MIAI) dalam rangka mempersatukan organisasi-

organisasi Islam Indonesia untuk bekerjasama, menjadikan MIAI sebagai wadah ukhuwah Islamiyah, berikhtiar menyelamatkan Islam dan Bangsa serta melakukan kajian-kajian sekaligus memutuskan tindakan-tindakan dalam rangka mempengaruhi kebijakan-kebijakan Belanda pada waktu itu.

Dalam MIAI tokoh Muhammadiyah dan lainnya sangat banyak berbicara soal politik dan membuat keputusan penting misalnya menuntut pembebasan HAMKA, penolakan pemindahan perkara waris dari pengadilan agama ke pengadilan negeri, menuntut pemerintah mengambil tindakan tegas kepada Sumandari yang menghina Nabi Muhammad SAW dan lain sebagainya.

Pada masa meraih kemerdekaan bangsa dari penjajahan Muhammadiyah juga terlihat memainkan peran yang cukup penting. Beberapa tokoh Muhammadiyah antara lain Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Singodimedjo. Prof. Kahar Mudzakir menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan mempersiapkan Undang-undang Dasar, yang sekarang dikenal dengan nama UUD 1945.

Sementara itu, pada masa kemerdekaan keterlibatan Muhammadiyah dimulai ketika diadakannya kongres umat islam se-Indonesia pada 7-8 November 1945 yang berlangsung di gedung Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta telah melahirkan berdirinya partai Islam Masyumi. Posisi Muhammadiyah pada waktu itu adalah menjadi anggota Istimewa yang mempunyai hak untuk memberikan nasehat kepada partai. Dengan kedudukan sebagai anggota istimewa di partai Islam Masyumi Muhammadiyah punya peran dan tugas penting dalam mempengaruhi kebijakan partai, pengaruh ini bisa dianalisa dari betapa banyaknya tokoh Muhammadiyah mulai dari pusat sampai ke daerah menjadi pegiat dan penggerak di Masyumi.

Kemudian di masa awal Orde Baru kiprah politik Muhammadiyah khususnya dalam hal politik praktis ditandai dengan keterlibatannya dalam pendirian Parmusi ditahun 1968. Berdasarkan SK Presiden No.70 Tahun 1968 Parmusi resmi berdiri, dengan menempatkan Jarnawi Hadikusumo dan Lukman Harun sebagai Ketua dan sekretaris dimana kedua tokoh ini adalah tokoh Muhammadiyah walaupun pada akhirnya kepemimpinan mereka diambil alih karena dianggap telah membawa Parmusi terlibat dalam oposisi menentang pemerintahan.

Peristiwa “kudeta” dan *recall* terhadap tokoh Muhammadiyah menjadi titik awal kesadaran bagi tokoh-tokoh Muhammadiyah, bahwa politik bukan ladang yang tepat dan tempat yang nyaman untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah, konflik kepentingan sangat mendominasi perilaku politisi. Muktamar Muhammadiyah ke-38 tahun 1971 di UjungPandang salah satu keputusannya berbunyi bahwa Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam segala bidang kehidupan manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari suatu partai politik atau organisasi apapun. Namun demikian Muhammadiyah tetap menjamin hak azazi para anggotanya untuk dapat tidak atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dalam perserikatan Muhammadiyah.

Artinya, walau secara organisatoris Muhammadiyah tidak lagi punya hubungan dengan partai politik namun tokoh, kader dan anggota Muhammadiyah tetap bebas mengekspresikan kepentingan politik mereka sebagai hak dasar yang harus diperjuangkan. Konsekuensi dari keputusan yang dianggap cerdas dan strategis ini adalah bertebarannya kader Muhammadiyah di berbagai lini politik strategis di Negara ini yang tentu akan menimbulkan

dinamika politik yang beragam baik di Muhammadiyah secara internal sampai dinamika di lingkungan luar Muhammadiyah.

Gambaran singkat Muhammadiyah dan politik diatas, sejak awal berdiri hingga awal orde baru telah membuka mata kita betapa Muhammadiyah memang tidak luput dari persinggungan politik Negara. Walaupun saat ini tidak lagi akan bersinggungan secara ril dengan politik praktis namun keberadaan Muhammadiyah tetap menjadi primadona yang cantik dalam konstelasi politik sampai detik ini.

Keterlibatan Tokoh dan elit Muhammadiyah dalam politik banyak sekali menjadi perhatian pengamat terkait dengan pengaruh perilaku elit tersebut dengan Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi. Perilaku elit Muhammadiyah kadang sejalan dengan Perserikatan tetapi adakalanya juga tidak begitu menguntungkan Muhammadiyah. Kadang Muhammadiyah di asumsikan menjaga jarak dengan pemerintah namun ada juga yang berpendapat Muhammadiyah dekat dengan pemerintah, hal ini tentu dari sudut mana kita melihatnya. Sikap kritis dan sikap akomodatif menjadi dua hal yang selalu dipertentangkan jika ingin melihat pola perilaku politik Muhammadiyah, namun apapun itu sebenarnya perilaku politik Muhammadiyah tersebut adalah sebuah cerminan dari perilaku individu kader Muhammadiyah yang bebas mengekspresikan sikap politik mereka terutama yang dimainkan oleh para elit Muhammadiyah.

Dinamika kepolitikan Muhammadiyah pasca Muktamar Muhammadiyah di Ujung pandang menampakan geliatnya kembali sejak Amin Rais dinobatkan sebagai ketua PP Muhammadiyah pada Muktamar ke 43 di Banda Aceh, Citra Muhammadiyah yang *politicking* (ikut bermain politik) di bawah kepemimpinan Amin Rais sebenarnya diawali oleh pribadi Amin Rais selaku intelektual/ilmuan politik yang *concern* dengan permasalahan yang dihadapi

bangsanya. Selanjutnya disusul oleh langkah-langkah Amin Rais terutama dalam menggulirkan ide-ide cemerlang yang kritis-konstruktif, sehingga secara kelembagaan Muhammadiyah terbawa pada citra *politicking* (Suwarno : 2001: 60).

Kalau dibandingkan dengan periode sebelumnya yang diistilahkan oleh Suwarno sebagai gerakan Muhammadiyah yang berorientasi sosial-kultural Muhammadiyah Cuma melakukan pemantapan sebagai gerakan amal yang berkonsentrasi pada pengembangan amal usaha, menerima begitu saja kebijakan pemerintah tentang azas tunggal, dan bersikap akomodatif-kooperatif dengan kepemimpinan kolegal menjadi indikasi pada periode ini Muhammadiyah seperti mengalami trauma terlibat dalam politik praktis atau paling tidak mencoba mengaktualisasikan secara sempit hasil dari muktamar ke-38 di Ujung Pandang tersebut. Namun apaun itu menurut hemat peneliti ini semua tak lepas dari pola perilaku elit Muhammadiyah pada waktu itu. Seperti yang diketahui sebelum muncul sosok Amin Rais Muhammadiyah di pimpin oleh figur yang dikenal sebagai figur kepemimpinan bersahaja yaitu H. AR Facruddin dan dilanjutkan oleh K.H.Ahmad Azhar Basyir dimana kedua sosok ini bisa di kategorikan sebagai Ulama yang berbeda dengan sosok Amin Rais sebagai seorang intelektual. Namun pola perilaku kooperatif-akomodatif yang kurang kritis bahkan cenderung subornatif tidak bisa pula disalahkan karena keadaan memang tidak memungkinkan untuk bersikap kritis karena dominasi Rejim Orde Baru yang sangat kuat dan mampu mengontrol seketat mungkin keberadaan ormas dan orpol termasuk Muhammadiyah.

Masa jabatan Ketua PP Muhammadiyah yang disandang oleh Amin Rais semestinya disandang oleh Amin Rais sampai tahun 2000, tetapi pada 1998, setelah jatuhnya Soeharto , Amin Rais harus berkonsentrasi sebagai ketua Partai Amanat Nasional (PAN) yang kemudian jabatan Ketua PP Muhammadiyah dijabat oleh A. Syafii Ma'arif.

Setelah berdirinya PAN pada 23 Agustus 1998, Muhammadiyah kelihatan terjebak dalam hubungan dilematis. Disatu sisi, Muhammadiyah menyatakan bahwa secara legal organisatoris tidak ada hubungan sama sekali antara Muhammadiyah dengan PAN namun disisi lain ada hubungan kental yang bersifat emosional-psikologis dilihat dari banyaknya pengurus Muhammadiyah di daerah-daerah yang terjun dalam PAN. Sampai disini kembali bisa diamati betapa perilaku elit Muhammadiyah dalam politik membuat kecendrungan penafsiran bahwa itulah Muhammadiyah dalam konteks lembaga. Orang, baik kalangan Muhammadiyah maupun dari luar Muhammadiyah akan susah membedakan antara sikap Amin Rais secara individu dengan sikap Muhammadiyah secara kelembagaan, makanya tidak berlebihan ada asumsi bahwa kalau hendak melihat sepak terjang Muhammadiyah, cermati saja perilaku elit Muhammadiyah.

Terlepas dari itu semua, kehadiran Amin Rais dan PAN menjadi satu periode penting dalam sejarah Muhammadiyah dan politik, seakan dengan keberadaan PAN di DPR apalagi mampu mengantarkan Amin Rais menjadi Ketua MPR, telah menjadikan Muhammadiyah sebagai ormas yang memiliki saham politik di Negara Indonesia ini, walaupun sebagian kalangan juga banyak menaruh rasa kecewa atas sepak terjang PAN yang notabene dianggap partai Muhammadiyah tetapi tidak mampu menjadi pengemban kepentingan Muhammadiyah, dimana pada akhirnya muncul pula sebuah partai yang diprakarsai para angkatan muda Muhammadiyah yang merasa dikecewakan oleh PAN, partai tersebut adalah Partai Matahari Bangsas (PMB) yang juga didukung penuh secara moral oleh Muhammadiyah yang pada waktu itu di ketuai Oleh Din Syamsudin.

Di periode kepemimpinan A.Syafi`I Ma`arif Muhammadiyah dan politik tetap menjadi satu perhatian yang kucup menarik, beda Amin Rais beda pula Syafi`I Ma`arif yang dikenal juga sangat bersahaja, malah sering di gelari dengan guru bangsa, konsep *High Politic*

yang diartikan oleh Amin Rais sebagai “politik kualitas tinggi” atau “politik yang luhur” yang mengedepankan moral justru dimainkan oleh Syafi’I Ma’arif. Kegiatan pro aktif PP Muhammadiyah dalam mempengaruhi dan mengevaluasi kinerja dan kebijakan pemerintah secara tegas dan lugas menjadi salah satu karakteristik Muhammadiyah dalam konteks perilaku politiknya di masa periode ini.

Setelah habis masa jabatan Syafi’I Ma’arif berakhir pada Mukatamar Muhammadiyah yang ke 45 di Malang pada tahun 2005, Din Syamsudin terpilih sebagai ketua Umum PP Muhammadiyah. Terpilihnya sosok Din Syamsudin tentu dapat di perkirakan bagaimana Muhammadiyah kedepan terkhusus dalam hal hubungan Muhammadiyah dengan politik di Negeri ini. Din Syamsudin merupakan tokoh muda Muhammadiyah yang enerjik, mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah ini merupakan sosok yang begitu “melek” Politik, dia dikenal juga sebagai politikus handal, pernah menjadi Sekjen MUI dan menjadi salah seorang ketua Litbang Partai Golkar.³

Dalam Kepemimpinan Din begitu kental wajah politik dalam Muhammadiyah, teramat sering melalui Din sebagai ketua Muhammadiyah menggelar agenda-agenda politik yang berusaha secara cerdas mengkritisi kepemimpinan Nasional serta merespon berbagai kebijakan Negara yang dianggap tidak menguntungkan public. Sebagai tokoh yang giat menyuarakan toleransi dalam hidup beragama Din juga begitu sering membuat pernyataan-pernyataan yang memarahkan kuping pemerintah, dalam kata lain fungsi Muhammadiyah dalam konteks sebagai kelompok kepentingan kelihatannya telah mampu dilakukan pada kepemimpinan Din Syamsudin. Walau cukup banyak dapat tantangan dari berbagai kalangan internal perserikatan akan sikap dan perilaku politik yang dimainkan Din sehingga dia digadang-gadang untuk tidak

³ http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sirajuddin_Syamsuddin (diakses pada tanggal 29-02-2012)

mencalonkan lagi pada periode berikutnya, namun Muktamar Muhammadiyah yang ke 46 di Yogyakarta tahun 2010 Prof.DR.Din Syamsudin terpilih Kembali menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015. Dan itu Artinya dengan sosoknya sangat faham politik, kritis, dan responsive bisa dipastikan bahwa Muhammadiyah akan tetap menjadi actor inti dalam dinamika perpolitikan di Indonesia.

Peran dan dinamika Muhammadiyah dalam konteks politik ini tidak hanya berada dalam pentas ditingkat nasional, kecendrungan perilaku dan budaya politik Muhammadiyah ini tentu menjalar sampai ke tingkat lokal yaitu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, bahkan sampai ke tingkat ranting. Ada asumsi bahwa para Pimpinan Muhammadiyah ditiap tingkat itu sangat menyadari sekali bahwa Muhammadiyah sebagai sebuah perserikatan besar telah menjadi sumber daya yang akan diperhitungkan.

B. Perilaku Politik

Konsep perilaku dalam konteks ini tentu berhubungan dengan Perilaku manusia yaitu sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. (Miftah Thoha : 1983:33) menjelaskan bahwa Perilaku manusia dapat dikatakan sebagai hasil dari apa yang ada dalam benak mereka ditambah dengan situasi yang mendorong mereka untuk bertindak. Dalam hal ini, perilaku manusia dilandasi oleh sikap sebagai kecenderungan atau kesiapan untuk bereaksi terhadap sesuatu objek yang diwujudkan dalam suatu tindakan. Sementara itu sikap orang dirangsang oleh kekuatan norma-norma yang telah mereka pelajari dan harapan-harapan kultural mereka yang sangat fundamental (Oliver H. Woshinsky : 1995:129).

Manusia adalah salah satu dimensi dalam organisasi yang amat penting, merupakan salah satu faktor dan pendukung organisasi. Perilaku organisasi hakekatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya, oleh karena itu untuk memahami perilaku organisasinya sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi. Miftah Thoha merumuskannya sebagai berikut :

$$P=F(I,L)$$

Keterangan : P adalah *Perilaku*
F adalah *Fungsi*
I adalah *Individu*
L adalah *Lingkungan*

Rumusan diatas dapat dibaca “ Perilaku adalah suatu fungsi dari Interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya” (Miftah Thoha ; 1983 : 34)

Menurut Denis Kavanagh (1983:XIII) Kajian tentang perilaku politik (*political Behavior*) terpusat pada perilaku manusia yang menyangkut soal politik atau perilaku manusia dalam konteks politik. Artinya bahwa perilaku politik hanya merupakan salah satu aspek dari perilaku manusia pada umumnya dan terkait erat dengan perilaku lainnya seperti perilaku ekonomi, perilaku sosial, perilaku budaya dan perilaku agama.

Politik, ada begitu banyak defenisi yang telah dirumuskan, pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (Negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan itu. Perbedaan-perbedaan dalam mengartikan politik terjadi karena disebabkan perbedaan sudut pandang para sarjana dalam memilih aspek atau unsur dari politik itu. Setidaknya ada lima unsur / konsep pokok yang berkaitan langsung dengan politik yaitu : (1). Negara/*State* (2) Kekuasaan/*Power* (3) Pengambilan Keputusan/*Decisionmaking* (4) Kebijakan/*Policy* (5) Pembagian atau alokasi/*Distribution/allocation*. (Miriam Budihardjo ; 2003 ; 9).

David Easton memaknai politik dengan “bagaimana meng-alokasikan sejumlah nilai secara otoritatif bagi sebuah masyarakat” (*authoritative allocation of values for a society*)
Sejumlah nilai yang dimaksud, merujuk pandangan Harold Lasswell merinci delapan nilai, yaitu (1) Kekuasaan, (2) pendidikan/penerangan/*enlightenment*, (3) Kekayaan/*Wealth*, (4) Kesehatan/*well-being*, (5) Keterampilan/*skill*, (6) kasih sayang /*affection*, (7) Kejujuran/*rectitude*, (8) Respek/*respect*. (Miriam Budihardjo ; 2003 ; 33).

Dengan demikian, perilaku politik dapat diartikan, sebagai tindakan untuk mengalokasikan sejumlah nilai yang bersifat mengikat (otoritative) bagi suatu masyarakat. Tindakan tersebut sangat dipengaruhi oleh aspek-aspek kultural, terutama sistem nilai dan moral, yang mempengaruhi motivasi dan kemudian membentuk sikap dan mendorong tindakan sebagai suatu perilaku politik. Hubungan antara nilai dengan tindakan dapat digambarkan dalam skema berikut ini. (Suwarno : 2001 : 7)

Nilai → Motivasi → Sikap → Tindakan/aksi

Perilaku Politik juga dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan suatu keputusan. Kegiatan ini dilakukan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan (suprastruktur politik), sebaliknya masyarakat menjalankan fungsi-fungsi politik (Infrastruktur politik). (Ramlan Surbakti: 1992 : 31)

Sementara itu Jack C.Plano dan kawan-kawan(1989:161) memaknai perilaku politik sebagai fikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-tanggapan internal (Fikiran,persepsi,sikap dan keyakinan) dan juga tindakan-tindakan yang Nampak (Pemungutan suara, gerak protes,

lobbying, kaukus, kampanye, proses kebijakan publik. Dalam arti luas, perilaku “yang bersifat politik” bisa ditemui dalam setiap lingkup kelembagaan (Keluarga, Perusahaan dan sejenisnya).

Perilaku politik menurut Sudijono satroatmojo (1995:228) ditentukan pula oleh identitas yang ditentukan pula oleh masyarakat. Faktor pembentuk identitas bersama itu menurut Ramlan Surbakti (1982; 44-74) mencakup (1), identitas primordial, (2), sakral, (3), personal, dan (4) civilitas. Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat.

Faktor sakral pada umumnya didasarkan karena keagamaan yang sama. Dengan demikian, adanya pluralitas agama dan corak pemikiran keagamaan dalam suatu agama dengan sendirinya dapat pula membentuk perilaku politik seseorang. Faktor personal biasanya disandarkan kepada seseorang. Ketokohan seseorang menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. Dalam mengekspresikan perilaku politiknya, suatu masyarakat melihat perilaku politik yang diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutannya.

Faktor lain yang ikut membentuk perilaku politik seorang warga negara adalah yang berupa faktor sipil. Faktor sipil ini antara lain terlihat dalam tatanan kehidupan di masyarakat berupa keadilan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Terwujudnya rasa keadilan yang dirasakan seorang warga negara dalam berbagai bidang kehidupan misalnya, akan mendorong dirinya untuk mendukung pemerintahan yang ada. Dukungan yang diberikan kepada pemerintah ini dapat saja mengatasi (*mentransendensi*) faktor-faktor di atas. Ia mendukung suatu pemerintahan bukan karena presidennya memiliki kesamaan suku, agama, atau

kepribadiannya, melainkan lebih karena presiden itu dapat menyelenggarakan pemerintahan yang adil.

Denis Kavanagh (1983: 10) Studi perilaku politik bisa terfokus pada individu (aktor) dan bisa pula kelompok atau institusi (lembaga). Namun beberapa penelitian perilaku politik yang fokus pada institusi, perilaku politiknya tidak hanya diarahkan lewat aturan-aturan dan prosedur yang ada pada lembaga secara formal, tetapi bisa juga melalui perilaku aktual dan orientasi dari para individu yang berpengaruh atau menjadi tulang punggung dalam lembaga tersebut.

Fokus penelitian ini adalah ingin mendeskripsikan perilaku politik yang dimainkan oleh aktor atau individu yang dalam hal ini adalah elit pimpinan Muhammadiyah Kota Padangpanjang, kendatipun demikian sesuai teori bahwa biasanya perilaku individu akan mencerminkan perilaku organisasi. Perilaku politik elit Muhammadiyah di sini maksudnya adalah tindakan atau aktifitas elit pemimpin tersebut dalam mengalokasikan nilai-nilai yang bersifat mengikat bagi masyarakat, atau dalam ikut mempengaruhi proses pembuatan kebijakan-kebijakan public. Dapat pula dimasukkan disini tindakan atau kegiatan pada pimpinan Muhammadiyah kota Padangpanjang dalam ikut mengawasi kekuasaan pemerintah, atau membuat maneuver-maneuver politik berupa pandangan, pendapat dan sikap sehingga efektif untuk upaya melakukan *Check and balances*.

C. Elit Muhammadiyah

Elit adalah sebagian kecil orang yang ada dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan biasanya terdiri dari sekelompok orang yang memiliki status sosioekonomi tinggi, namun kelompok kecil inilah yang akan mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat. Dalam teori elit juga dijelaskan bahwa pengaruh pasti akan mengalir dari elit ke massa, tidak

sebaliknya dari massa ke elit, jadi sebenarnya jika kita mengacu pada teori ini elit akan berperan penting dalam segala bentuk aktifitas masyarakat, pendek kata perilaku elit akan mencerminkan perilaku massanya. (Solahuddin Kusumanegara: 2010 : 22-23)

Elit pemimpin dapat diartikan sebagai minoritas-minoritas pribadi yang dipilih atau diangkat untuk melayani suatu kolektivitas secara efektif dan bertanggungjawab kepada mereka. Golongan elit pemimpin itu memiliki makna sosial karena bertanggung jawab dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan sosialnya yang utama dan demi kelanjutan tata sosial dari suatu kolektivitas yang memilih atau mengangkatnya. (Suzane Keller : 1995 : 3)

Elit Muhammadiyah Kota Padangpanjang artinya minoritas-minoritas pribadi yang dipilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) Muhammadiyah Kota Padangpanjang untuk melayani Muhammadiyah dan anggotanya sebagai suatu kolektivitas terorganisasi dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan sosial Muhammadiyah dan demi kelanjutan organisasi tersebut. Mereka meliputi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padangpanjang yang terdiri dari 13 orang anggota ditambah dengan para Pimpinan Majelis yang ada di dalamnya. Dalam kaitan ini elit pemimpin Muhammadiyah dapat digolongkan kedalam *strategic elites* di bidang sosial-keagamaan. Meskipun elit pemimpin Muhammadiyah hanya *strategic elites* di bidang sosial keagamaan, mereka juga punya pengaruh terhadap kehidupan politik yang ditangani oleh *the ruling class*. Tentunya pengaruh itu secara tidak langsung, melalui lobi politik, kritik-kritik konstruktif, tokoh Muhammadiyah yang aktif diparpol, dan partisipasi politik lainnya. (Suwarno : 2001 : 10)

D. Budaya Politik Muhammadiyah

Konsep budaya politik. Secara sederhana, mengandung arti budaya yang mempengaruhi politik. Beberapa ilmuwan politik seperti Almond dan Verba mengartikan, budaya

politik sebagai sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, serta sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkannya dalam sebuah sistem politik. Budaya politik tidak lain dari pada orientasi psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi kedalam bentuk orientasi yang bersifat *cognitive*, *affective* dan *evaluative* (Afan Gafar :2002 :99)

Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota Negara, lambang Negara, kepala Negara dan lain sebagainya. Sementara itu, orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat *evaluative* menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu didalamnya.

Dengan sikap dan orientasi seperti itu, kemudian terbentuklah budaya politik yang berbeda. Dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi politiknya bersifat kognitif akan terbentuk budaya politik yang *parokial*. Sementara, dalam masyarakat yang sifat orientasi politiknya diwarnai karakteristik afektif, akan terbentuk budaya politik yang bersifat subjektif. Akhirnya, di mana warga masyarakat mampu memberikan evaluasi terhadap terhadap proses politik yang berjalan, akan terbentuk sebuah budaya politik yang bersifat partisipatif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini (Afan Gafar : 2002: 100)

Tabel.2.1 Hubungan antara orientasi terhadap sistem politik dengan budaya politik

Budaya Politik \ Orientasi Terhadap Sis.Politik	Parokial	Subjektif	Partisipan
Kognitif	XXX		
Afektif		XXX	
Evaluatif			XXX

Budaya politik parochial ditandai apabila sebagian besar individu atau warga Negara mengetahui tentang sistem politik yang sedikit, dan keterlibatannya dalam kegiatan politik rendah. Kemudian budaya politik subjektif sebagian besar individu atau warga Negara menjadi subyek yang pasif, patuh pada pemerintah dan tunduk pada hukumnya, namun tidak melibatkan diri dalam urusan politik pemerintah. Sedangkan budaya politik partisipan ditandai oleh keterlibatan sebagian besar individu atau warga Negara dalam kegiatan politik. Budaya politik yang terakhir ini akan dimiliki oleh masyarakat industrial dengan sistem politik yang demokratis.

Budaya politik biasanya dibagi dalam dua kategori, yaitu budaya politik elit dan budaya politik massa. Budaya politik elit melibatkan sikap dan perilaku mereka yang mempunyai peranan aktif dan berpengaruh dalam sistem politik. Sebaliknya, budaya politik massa dibentuk oleh sikap dan perilaku politik rakyat secara keseluruhan, termasuk partisipasi mereka dalam kegiatan politik (Nico Teguh Budi : 1997 :256-257). Dalam penelitian ini yang lebih dikedepankan adalah budaya politik elit yaitu elit Muhammadiyah Kota Padangpanjang

Budaya politik Muhammadiyah merupakan bagian dari budaya politik nasional bangsa Indonesia yang ikut mewarnai sistem politik Indonesia. Tiga hal yang dapat dicatat terkait budaya politik Muhammadiyah sebagaimana telah digambarkan oleh Suwarno yaitu : (1)

bahwa Muhammadiyah dari awal telah mengembangkan budaya politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Hal ini terbukti dalam pemilihan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Mukhtar yang disaring dari bawah.. (2) Budaya politik egaliter, sisi egaliter ini nampak dari tidak adanya tradisi cium tangan kepada pimpinan, tidak ada tradisi pemberian upeti kepada ulama atau kyai dan tidak adanya kebiasaan untuk patuh dan sikap kritis kepada pimpinan. (3), dalam pandangan A. Syafii Maarif, budaya politik Muhammadiyah adalah budaya politik terobosan atau alternative bukan budaya politik eliter apalagi monolitik . Budaya politik Muhammadiyah menonjol lainnya ialah kecendrungan pada konsensus, ini menimbulkan sikap yang moderat dalam Muhammadiyah. (Suwarno : 2001 : 66-67)

Maka dari beberapa karakteristik budaya politik Muhammadiyah sebagaimana dijabarkan di muka Suwarno akhirnya berkesimpulan bahwa dalam hubungannya dengan kekuasaan sikap dasar Muhammadiyah dapat dirumuskan sebagai sikap yang kooperatif yaitu mau bekerjasama untuk kepentingan dan kebijakan bersama.. Budaya politik Muhammadiyah yang tercermin dari sikap dan perilaku elit Muhammadiyah ini dirumuskan pada dua kategori pola perilaku politik Muhammadiyah dalam hubungannya dengan kekuasaan(pemerintah) yaitu (1) perilaku politik kooperatif-kritis terhadap kekuasaan yaitu mau bekerja sama, tetapi aktif untuk selalu memainkan fungsi kritik. (2), Kooperatif-akomodatif artinya tergantung pada kekuasaan itu sendiri, Muhammadiyah bisa dekat dengan kekuasaan atau sebaliknya Muhammadiyah bisa menjauh dari kekuasaan itu. (Suwarno : 2001 : 72)

BAB III

Tujuan Luaran dan Kontribusi Penelitian

Adapun Tujuan luaran dan Kontribusi penelitian ini adalah :

1. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan ilmiah untuk penelitian-penelitian selanjutnya terutama penelitian-penelitian dengan substansi kajian politik, begitu juga untuk memperkaya bahan bacaan/literatur pada mata kuliah yang berkaitan dengan studi-studi politik di lingkungan FIS UNP secara umum dan lingkungan Jurusan Ilmu Sosial Politik secara khusus.
2. Penelitian ini nantinya diharapkan hasilnya bisa dituangkan dalam bentuk jurnal ilmiah yang akan di terbitkan.
3. Secara praktis tentu hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi para elit dan Muhammadiyah Kota Padang Panjang untuk mengembangkan kinerja organisasi dalam mengimplentasikan program-programnya serta mengembangkan pola atau karakteristik perilaku elitnya dalam hubungannya dengan politik.

BAB IV METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

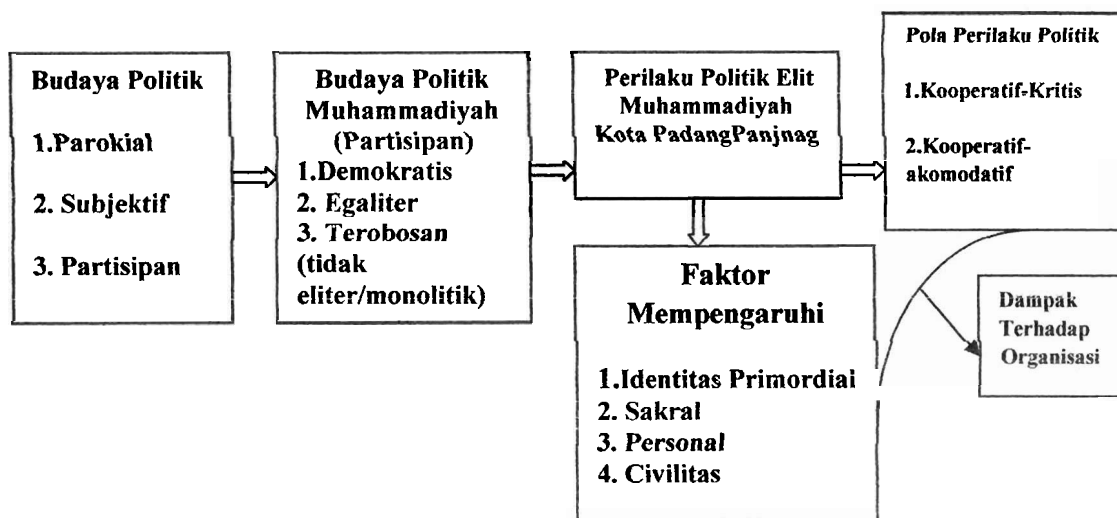
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap dan mendalam tentang fenomena yang dikaji, karena itu penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penggambaran secara mendalam situasi, atau proses yang diteliti.

Adapun jenis penelitian kualitatif yang dipakai pada penelitian ini adalah studi kasus (*case studies*). Studi kasus merupakan penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu. Tujuannya untuk memperoleh deskripsi yang utuh dan mendalam dari sebuah entitas. Bogdan(1990) mendefinisikan studi kasus sebagai kajian yang rinci atas satu latar atau satu peristiwa tertentu. Robson (1993) lebih memosisikan studi kasus sebagai suatu strategi untuk melakukan penelitian.(Muhammad Idrus 2002:77-78). John W. Cresswel (1998:141) mengatakan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang sering dilakukan dalam penelitian bidang politik.

Namun mengingat singkatnya waktu penelitian serta terbatasnya biaya dalam penelitian ini maka jenis penelitian studi kasus pada penelitian ini adalah study kasus terpancang (*embedded case study*) disini fokus atau tujuan utama dari penelitian ditentukan terlebih dahulu sebelum peneliti terjun ke lapangan sehingga peneliti tetap terfokus pada masalah yang telah dirumuskan dan penelitian tidak berubah arah sehingga desain asli tetap dengan pertanyaan pertanyaan yang telah dirumuskan pada awal penelitian.

Berdasarkan hasil telaah kajian teori pada bab. Sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Budaya politik Muhammadiyah jelas mengarah pada budaya politik yang partisipatif karena orientasi terhadap sistem politik bersifat evaluative. Ini tergambar sejak awal bahwa Muhammadiyah telah membudayakan perilaku yang demokratis, egaliter dan budaya alternative (tidak eliter apalagi monolitik), dan akhirnya menciptakan 2 kategori/klasifikasi pola perilaku politik yaitu kooperatif-kritis dan kooperatif akomodatif dalam hubungannya dengan kekuasaan (pemerintah). Dalam teori perilaku politik, perilaku seseorang dalam politik akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu identitas primordial, sacral, personal dan civilitas. Penelitian ini terfokus hanya untuk menjawab pertanyaan penelitian terkait karakteristik perilaku politik seperti apa yang diperankan oleh elit Muhammadiyah Padangpanjang dan faktor apa yang mempengaruhi perilaku tersebut, serta apa dampaknya terhadap perserikatan dengan acuan kategori dan konsep diatas.

Untuk lebih jelasnya penelitian ini bisa di lihat dalam skema berikut ini:



2. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian dikumpulkan dengan menggunakan tiga cara yaitu :

- 1) Wawancara yaitu komunikasi verbal dengan informan berkaitan dengan substansi penelitian, oleh karena itu wawancara yang dipergunakan adalah teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), dimana informannya telah mengetahui maksud dan tujuan peneliti secara garis besar dan sifatnya tidak mengikat.
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD), ini dirancang untuk melakukan pengumpulan data dengan menggunakan sebuah forum diskusi dengan tema-tema yang sesuai dengan tujuan penelitian. Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai macam segmen yang dianggap memahami, memiliki ketertarikan dan selalu mengikuti perkembangan dari subyek penelitian ini.
- 3) Dokumentasi, yaitu melakukan studi dokumentasi terhadap laporan yang telah dipublikasikan ataupun dari buku-buku pustaka yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, teknik dokumentasi juga digunakan jika ada bahan-bahan/dokumen-dokumen penting sebagai pendukung dari data yang sudah didapatkan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini istilah yang digunakan untuk subyek penelitian adalah *informant* atau *key informant*. Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang dapat memberikan keterangan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan

penelitian. Dengan menggunakan teknik *purposive saming* yaitu dengan sengaja memilih informan melalui berbagai macam pertimbangan rasional karena dianggap informan tersebut betul-betul bisa memberikan penjelasan terkait focus penelitian ini. (Muhammad Idrus :2002: 125)

Adapun informan itu adalah Elit Muhammadiyah Kota Padangpanjng yang meliputi 13 orang Anggota Pimpinan hasil Musyawarah Daerah Ke 40 periode 2010-2015. Ditambah dengan para pimpinan majlis dan lembaga yang ada di jajaran PD. Muhammadiyah Kota Padangpanjang masa jabatan 2010-2015 serta beberapa informan dari luar struktur PD.Muhammadiyah Kota Padangpanjng untuk mengkros-cek data yang ada.

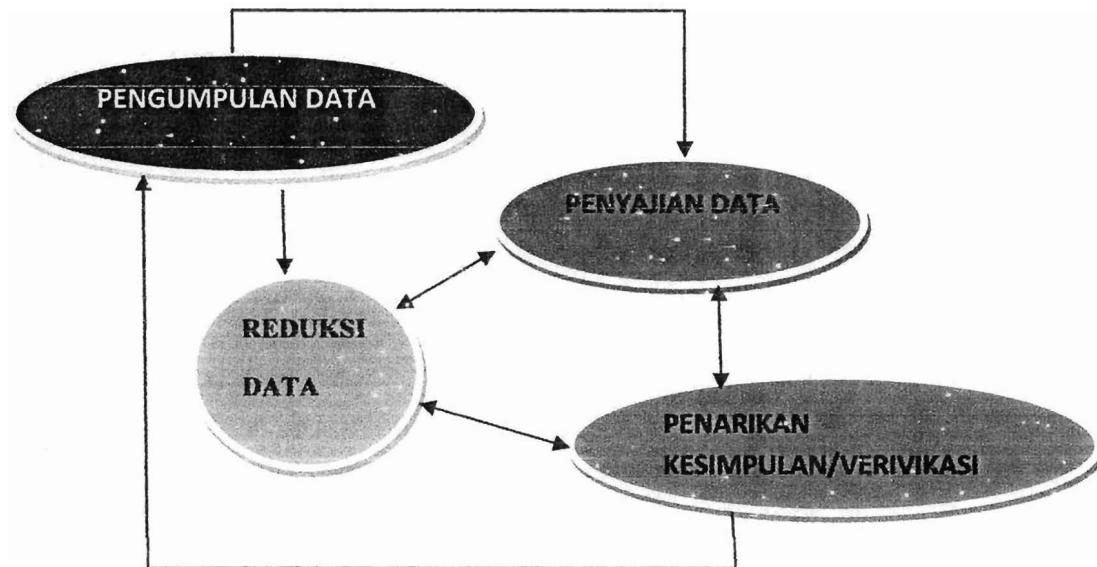
4. Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan sehingga memiliki makna.(Masri Singarimbun : 1982: 263). Selain itu, analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian data yang terdiri atas catatan lapangan, hasil wawancara, hasil diskusi dan dokumentasi dengan cara mengumpulkan, mengurut, mengelompokan dan mengkategorikan data sehingga mudah untuk disajikan secara deskriptif.

Adapun dalam penelitian ini model analisis data yang dipergunakan adalah model analisis interaktif. Model ini terdiri dari tiga hal utama yaitu : reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verivikasi. Ketiga komponen ini sesuatu yang jalin-menjalin (Interaktif) pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar. Oleh karena itu, peneliti dalam hal ini mencoba sedini mungkin melakukan pengorganisasian data sesuai dengan focus atau pertanyaan-pertanyaan penelitian dan sesuai dengan kronologis dari

proses pengumpulan data agar mudah melakukan reduksi,interpretasi dan verivikasi data yang ada.

Model Analisis data Interaktif tersebut dapat disedehanakan dengan gambar sebagai berikut :



(Miles dan Huberman,1992)

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Elit Pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang

Tanggal 30 April -1 Mei 2011 bertepatan 26-27 Jumadil Awal 1432 H Muhammadiyah Kota Padang Panjang melaksanakan Musyawarah Daerah (Musyda) ke 40 bertempat di Komplek Perguruan Kauman Muhammadiyah Padang Panjang. Musyawarah Daerah (Musyda) merupakan sebuah mekanisme pemilihan berkala lima tahunan yang dijadikan oleh warga Muhammadiyah di tingkat Kabupaten dan Kota untuk memilih pimpinan persyarikatan yang diberikan kewenangan secara legal formal untuk menjalankan semua program kerja organisasi yang telah direncanakan. (Tanfidz Keputusan Musyda Ke 40)

Rotasi kepemimpinan menjadi hal yang penting bagi sebuah organisasi sebesar Muhammadiyah, spesial bagi Muhammadiyah kota Padang Panjang yang dinilai menjadi organisasi sosial keagamaan terbesar di Kota tersebut. Hal ini dapat diidentifikasi dari begitu banyaknya amal usaha Muhammadiyah yang mempunyai peranan penting dalam menopang program-program pemerintah dan program-program kemasyarakatan.

Musyda ke 40 yang diselenggarakan itu mengagendakan berbagai macam acara, namun agenda utamanya adalah melakukan pemilihan pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang periode 2010-2015. Periode ini menjadi penting bagi penelitian ini karena memang dalam melihat pola perilaku elit Muhammadiyah akan dibatasi pada periode Pimpinan yang terbaru ini, sehingga orang-orang yang terpilih di Musyda ke 40 tersebut secara otomatis menjadi sumber utama dalam menghimpun data-data penelitian ini. (Tanfidz Keputusan Musyda ke 40)

Secara teoritis elit dapat diartikan sebagai minoritas-minoritas pribadi yang dipilih atau diangkat untuk melayani suatu kolektivitas secara efektif dan bertanggungjawab kepada mereka. (Suzane Keller : 1995 :3) Maka elit Muhammadiyah artinya minoritas-minoritas pribadi yang dipilih melalui suatu mekanisme yang disebut Mukhtar kalau untuk Pimpinan Pusat, Musyawarah Wilayah (Musywil) untuk pemilihan Pimpinan Wilayah dan Musyawarah Daerah (Musyda) Untuk memilih Pimpinan yang ada di tingkat Kabupaten dan Kota. (Suwarno : 2001:9). Pimpinan yang terpilih bertugas untuk melayani Muhammadiyah sebagai suatu kolektivitas terorganisasi dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan sosial Muhammadiyah dan demi kelanjutan organisasi tersebut.

Sesuai dengan hasil Musya ke 40 Muhammadiyah Kota Padang Panjang tersebut maka telah disahkan oleh pimpinan sidang pada waktu itu yang dipimpin oleh Bapak H. Mirdas Ilyas, S.Ag hasil pemilihan anggota pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuah X Koto periode 2010-2015 sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 39 orang calon yang diajukan oleh Musyawarah Pimpinan. Ke tigabelas orang anggota pimpinan terpilih itu merupakan orang-orang yang mendapatkan suara terbanyak dari ke 39 calon yang diajukan oleh musyawarah pimpinan sebelumnya.

Adapun ketiga belas orang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Joni Nasri, S.Ag
2. Drs. Fahrizal Alwis
3. Zulfiadi Hutabarat, S.Ag.M.Si
4. Syafril Alwis, S.Ag
5. Dr.H. Adirozal, M.Si
6. Indra Madi, S.Ag

7. Drs. Zulkarnain Harun, M.Si
8. Abdul Gafar, S.Ag
9. Drs. H. Harmaini L.MM
10. Drs. Sunar TS
11. Musriadi Musanif, S.Th.I
12. Defrial Anwar
13. H. Mirdas Ilyas, S.Ag.

Inilah 13 besar dengan perolehan suara sesuai dengan nomor urut diatas. Proses selanjutnya adalah ketiga belas orang ini melakukan rapat formatur untuk menentukan siapa yang akan menjadi ketua Pimpinan Daerah, artinya perolehan suara terbanyak tidak serta merta secara otomatis langsung terpilih secara aklamasi menjadi ketua Pimpinan. Kalau itu yang terjadi maka mestinya Bapak Joni Nasri , S.Ag lah yang terpilih menjadi ketua Pimpinan.

Namun berdasarkan sidang formatur diputuskanlah untuk bisa ditetapkan Bapak Drs. Fahrizal Alwis sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah PadangPanjnag Batipuah X Koto Periode 2010-2015 yang selanjutnya diberi tugas untuk menyusun ke 13 orang anggota tersebut pada posisi-posisi yang telah diatur secara struktural oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perserikatan.

Maka berdasarkan surat keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah PadangPanjang Batipuh X Koto Nomor 02 / Kep / III.O / D / 2011 Tanggal 18 Syaban 1432 H / 20 Juli 2011 diputuskanlah struktur pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang sebagai berikut :

1. Ketua : Drs. Fahrizal Alwis
2. Wakil Ketua : H. Mirdas Ilyas, S.Ag
3. Wakil Ketua : Syafril Alwis, S.Ag

4. Wakil Ketua : Musriadi Musanif, S.Th.I
5. Wakil Ketua : Indra Madi, S.Ag
6. Wakil Ketua : Drs. Sunar
7. Wakil Ketua : Dr.H.Adi Rozal, M.Si
8. Wakil Ketua : Drs. H. Harmaini L.MM
9. Sekretaris : Drs. Zulkarnaini Harun. M,Si
10. Wakil Sekretaris : Zulpiadi Hutabarat, S.Ag, M.Si
11. Wakil Sekretaris : Joni Nasri, S.Ag
12. Bendahara : Abdul Gafar, S.Ag
13. Wakil Bendahara : Defrial Anwar, S.Pd.I

Untuk lebih jelasnya tabel dibawah ini dapat menggambarkan tentang pembagian tugas dari masing-masing anggota pimpinan yang telah ditempatkan pada posisi-posisi secara strukturtal dalam perserikatan.

Tabel : V.1. Pembagian Tugas dan Jabatan 13 Orang Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Periode 2010-2015

NO	NAMA	JABATAN
1	Drs. Fahrizal Alwis	Ketua
2	H. Mirdas Ilyas, S.Ag	Wakil Ketua Sebagai Koordinator a. Majelis Tarjih dan Tajdid b. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
3	Syafril Alwis, S.Ag	Wakil Ketua Sebagai Koordinator Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus
4	Musriadi Musanif, S.Th.I	Wakil Ketua Sebagai Koordinator a. Majelis Dikdasmen b. LPPK
5	Indra Madi, S.Ag	Wakil Ketua Sebagai Koordinator Majelis Pendidikan Kader
6	Drs. Sunar	Wakil Ketua Sebagai Koordinator a. Majelis Pelayanan sosial dan Kesehatan b. Lembaga Penanggulangan Bencana
7	Dr.H.Adi Rozal, M.Si	Wakil Ketua Sebagai Koordinator a. Majelis Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat b. Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik
8	Drs. H. Harmaini L.MM	Wakil Ketua Koordinator a. Majelis Wakaf dan kehartabendaan b. Lembaga ZIS
9	Drs. Zulkarnaini Harun. M,Si	Sekretaris
10	Zulpiadi Hutabarat, S.Ag, M.Si	Wakil Sekretaris
11	Joni Nasri, S.Ag	Wakil Sekretaris
12	Abdul Gafar, S.Ag	Bendahara
13	Defrial Anwar, S.Pd.I	Wakil Bendahara

Sumber : SK PD.Muhammadiyah Padang Panjang No.02/Kep/III.0/D/2011

Selain 13 orang Anggota Pimpinan harian diatas, ada beberapa orang yang juga dianggap punya peran cukup penting dalam melaksanakan program-program perserikatan khususnya dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah di rumuskan dan ditentukan tujuannya. Orang-orang ini adalah yang menjadi pemimpin atau ketua di berbagai Majelis-majlis dan lembaga-lembaga yang ada di PD.Muhammadiyah Kota padang Panjnag.

Secara jelas dan ringkas Nama Majelis/lembaga dan pimpinan yang akan bertanggungjawab melaksanakan program-program Majelis tersebut digambarkan dengan tabel-tabel dibawah ini .

Tabel. V.2. MAJLIS TARJIH DAN TAJDID

1	Koordinator	Drs. H. Mirdas Ilyas
2	Ketua	Gusharia Putra, S. Ag, MA
3	Wakil Ketua	Zuriadi, S.Pd.I
4	Sekretaris	Zulkifli, S.Pd.I, M.Pd.I
5	Anggota	Ade Sehabuddin, SH, MH
6		Wahyu Salim

Sumber : SK PD.Muhammadiyah Padang Panjang No.02/Kep/III.0/D/2011

Tabel. V.3. MAJLIS TABLIH DAN DAKWAH KHUSUS

1	Koordinator	Syafril Alwis
2	Ketua	Hasanuddin S.Ag
3	Wakil Ketua	Rafles Dt.Mangkuto Nan Itam
4	Sekretaris	Arab Mustakribah, S.Pd.I
5	Anggota	Drs.H.M. Taher Hanif, MA
6		Syafnal, S.Ag.

Tabel.V.4. MAJLIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

1	Koordinator	Musriadi Musanif, S.Th.I
2	Ketua	Drs.Amel Dahlan
3	Wakil Ketua	Alfiar, M.Pd
4	Sekretaris	Yurminanto
5	Anggota	Surya Eka Prianan, ST
6		Drs.Harisman, M.Si
		Drs. Erochiyat Putra

Sumber : SK PD.Muhammadiyah Padang Panjang No.02/Kep/III.0/D/2011

Tabel.V.5. MAJLIS EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1	Koordinator	Dr.H.Adirozal, M.Si
2	Ketua	H.Erwan Yunus, SE
3	Wakil Ketua	Drs. Syamsul Anwar, MM
4	Sekretaris	Yuska Putra, S.Pd
5	Anggota	Erianto , S.Pd
6		Suheri, S.Pd.I
		Hendriko

Tabel. V.6. MAJLIS PELAYANAN SOSIAL DAN KESEHATAN

1	Koordinator	Drs. Sunar TS
2	Ketua	Dr. H. Mawardi, M.Kes
3	Wakil Ketua	Suharman S.Ag
4	Sekretaris	Drs. Syahrul
5	Anggota	Drs. Nuryanuar, Apt,MM,M.Kes
6		Agus Salaim, S.Pd.I

Sumber : SK PD.Muhammadiyah Padang Panjang No.02/Kep/III.0/D/2011

Tabel.V.7. MAJLIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN

1	Koordinator	Drs.H.Harmaini L.MM
2	Ketua	Drs.Dt.Sinaro Mudo, S.Pd.I
3	Wakil Ketua	Sukniadi
4	Sekretaris	Buchori,Dt. Lelo Marajo, S.Th.I
5	Anggota	Erizal, S.Pd.I
6		Nasril Dt, Tanbaro, S.PD

Sumber : SK PD.Muhammadiyah Padang Panjang No.02/Kep/III.0/D/2011

B. Program kerja PD.Muhammadiyah Kota Padang Panjang yang berhubungan dengan Politik

Ada banyak program yang telah dirumuskan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Padang Panjang yang hendak diimplementasikan selama masa periode 2010-2015. Program-program tersebut secara rinci bisa dilihat pada Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah Ke 40 Muhammadiyah Padang Panjang Batipuah X Koto antara lain bisa digambarkan secara ringkas di bawah ini :

1. Program Umum Perserikatan

1.1 Program Konsolidasi Ideologis

a. Visi Pengembangan

Teraktualisasinya prinsip-prinsip, idealism dan konsep-konsep dasar gerakan yang menunjukkan keunggulan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang maju/modern serta berperan aktif-strategis dalam dinamika kehidupan umat, bangsa dan perkembangan Global. (Tanfidz Keputusan Musyda ke 40)

Dari visi pengembangan ini terlihat bahwa Muhammadiyah Kota Padang Panjang punya sebuah visi yang berkonsekuensi pada sebuah program yang mengharuskan Muhammadiyah untuk dapat berperan aktif dan strategis dalam setiap dinamika kehidupan masyarakat. Agenda Masyarakat artinya adalah melakukan aktifitas yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik dengan sebuah kebijakan publik yang efektif. Sehingga secara otomatis Muhammadiyah Kota Padang Panjnag harus mampu bersinergi dengan pemerintah untuk melakukan kerjasama yang konstruktif.

b. Program Pengembangan

Untuk mengkonkritkan visi pengembangan diatas maka Muhammadiyah Kota Padang Panjang membuat beberapa program empirik yang dapat di implementasikan dalam rangka pencapaian visi yang telah ada antara lain :

1. Mengintensifkan pembinaan seluruh lini organisasi termasuk amal usaha, majlis, lembaga dan organisasi otonom Muhammadiyah melalui berbagai usaha yang terintegrasi
2. Meningkatkan posisi dan fungsi perserikatan sebagai sumber inspirasi dan rujukan pemikiran, sehingga Muhammadiyah menjadi kekuatan strategis serta tenda besar bagi Umat, Bangsa dan Negara
3. Mengembangkan Ideopolitor (Ideologi, politik dan Organisasi)
4. Meningkatkan upaya-upaya pengorganisasian dan penyebaran kader potensial ke dalam lembaga-lembaga strategis untuk memerankan fungsi, pencerahan, pembebasan, pemberdayaan dan pembangunan tatanan kehidupan.
5. Menyusun dan memproduksi konsep-konsep pemikiran strategis dalam menghadapi isu-isu, masalah dan tantangan publik (Tanfidz Keputusan Musyda ke 40)

Program Umum Muhammadiyah Kota Padang Panjang diatas menggambarkan bahwa ada beberapa program yang mengarah pada sebuah keniscayaan Muhammadiyah Padang Panjang untuk memainkan peran politik aktif dalam rangka ikut serta dalam mempengaruhi proses kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan politik umat.

Di dalam tanfidz keputusan Musyda ke 40 Muhammadiyah Padang Panjang Batipuah X Koto juga telah memutuskan beberapa program perbidang di masing-masing majlis dan lembaga yang ada di selingkunngan Muhammadiyah Padang Panjang mulai dari Program

Bidang Tarjih, Tajdid dan pemikiran Islam sampai program bidang Ekonomi dan ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah) dimana seluruh program-program tersebut juga menyertakan beberapa program yang menitikberatkan pada program-program sosial kemasyarakatan yang harus dikerjasamakan dengan *stake holder* formal yaitu pemerintah dengan berbagai macam usaha *bargaining position* yang efektif. (Tanfidz Keputusan Musyda ke 40)

Namun dari sekian banyak program ada beberapa program yang telah direkomendasikan oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah kota Padang Panjang yang menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan, dibawah ini adalah beberapa program rekomendasi yang peneliti anggap akan bersentuhan langsung dengan aktifitas politik elit dan secara langsung tentu elit akan menunjukkan perilaku politik mereka. Adapun program tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan Kerjasama dengan organisasi sejenis, lembaga pemerintahan setingkat (Pemerintah Kota dan DPRD) dan Organisasi lainnya (Partai Politik)
2. Pemimpin diminta untuk memberdayakan potensi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan dan mengawal masyarakat dalam mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah kota
3. Meminta Pemerintah Kota untuk mengeluarkan kebijakan yang tegas terhadap beberapa persoalan umat yang direkomendasikan oleh Muhammadiyah Kota Padang Panjang
4. Mengupayakan lobi yang intensif kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan perserikatan.
5. Melakukan pembicaraan dengan pemerintah kota agar bisa memasukan ke dalam APBD kota anggaran yang dialokasikan untuk Muhammadiyah.

6. Membuat satuan Khusus untuk menyiapkan proposal dan mengadakan pendekatan terhadap beberapa lembaga baik ditingkat daerah, Nasional dan internasional.
7. Memperluas kerjasama produktif, kerjasama dengan investor, seperti apotik, pertokoan dan sebagainya. (Tanfidz Keputusan Musyda ke 40)

C. Deskriptif Tentang Hubungan Elit Pimpinan Muhammadiyah Kota Padangpanjang dengan Kekuasaan

Dalam hubungannya dengan kekuasaan elit Muhammadiyah Kota Padangpanjang secara umum menunjukkan gejala yang cukup positif artinya Muhammadiyah dapat menjaga kelanggengan dan keharmonisan dalam setiap aktifitas yang berkaitan dengan kekuasaan. Berikut ini akan digambarkan bebepa hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa orang elit Muhammadiyah Kota PadangPanjang terkait bentuk Hubungan Muhammadiyah dengan Kekuasaan .

Ketua PD.Muhammadiyah Kota PadangPanjang Drs. Fahrizal Alwis dalam sebuah wawancara dengan peneliti pada tanggal 12 Oktober 2012 via *handphone* menuturkan bahwa :

“ Muhammadiyah dan pemerintah yang selama ini saya ketahui, sepanjang saya aktif di Muhammadiyah Pabasko ini, baik periode sebelum ini maupun setelah saya menjadi ketua belum ada terjadi sebuah pertikaian, Bapak wali kota kita kan orang Muhammadiyah, jadi kita harus saling mendukung”.

Kemudian terkait program dan kebijakan pemerintah selama ini ketua Muhammadiyah Kota PadangPanjang ini berbandapat bahwa:

“ Muhammadiyah tentu berusaha sekuat mungkin agar kebijakan pak Wali Kota itu mendukung program-program perserikatan, ada banyak program yang telah kami rekomendasikan dan disosialisasikan ke Pemerintah agar dapat direalisasikan dan Muhammadiyah siap mendukung serta bekerja sama”.

Fahrizal Alwis juga menjelaskan bahwa sejauh ini, sejak Kota PadangPanjang dipimpin oleh Bapak Suir Syam ada banyak hal yang dapat dikerjasamakan antara Muhammadiyah dan

Pemerintah, khususnya kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan masalah sosial/keagamaan dan pendidikan, baik kerjasama dalam perumusan kebijakan bahkan sampai kepada hal-hal operasional program dengan mekanisme memberikan kepercayaan kepada Muhammadiyah untuk mengimplementasikan program tersebut. Contohnya adalah program pemberdayaan masyarakat, tidak sedikit Mubaligh Muhammadiyah yang terlibat dalam program ini, jadi intinya saling mendukung.

Wawancara dengan elit yang lain pada tanggal 13 Oktober 2012 di rumah Indra Madi salah seorang Wakil Ketua PD Muhammadiyah Kota Padang Panjang dengan konteks pertanyaan yang sama ia menjawab bahwa :

“ Kami ini baru diangkat, belum sampai 2 tahun ini menjadi pengurus Muhammadiyah Kota Padang Panjang, namun sejauh ini saya merasakan tidak ada masalah yang mendasar dengan penguasa, semuanya datar-datar saja, Muhammadiyah selama ini telah melakukan beberapa kali audiensi dalam rangka menyampaikan program-program kerja sama dan mensosialisasikan beberapa program rekomendasi yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah dalam Musyda tahun lalu”

Wawancara dengan Zulkarnain Harun sekretaris PD Muhammadiyah Kota Padang Panjang via *Handphone* pada hari yang sama tanggal 13 Oktober dari rumah bapak Indra Madi juga menyampaikan hal yang hampir senada bahwa :

“ Selama ini pemerintah sangat akomodatif, jadi Muhammadiyah bisa bekerja sama dengan baik. Bapak wali itu kan dekat dengan Muhammadiyah sejak dia terpilih dulunya, salah satu faktor kemenangan dia waktu pemilihan dulu adalah karena derasnya dukungan dari Muhammadiyah, jadi kita sangat dekat dengan beliau, semua kebijakan-kebijakan yang diambil sejauh ini tidak ada yang berseberangan dengan agenda Muhammadiyah”.

Wawancara lain, yaitu dengan Bapak Defrial Anwar Wakil Bendahara PD, Muhammadiyah Pabasko di rumah beliau pada tanggal 13 Oktober 2012 mengungkapkan bahwa:

“ Hubungannya sangat baik, Pengurus Muhammadiyah periode ini punya kedekatan yang kuat dengan pak wali, hampir semua kami secara structural adalah bawahan pak Wali karena hanya 2 orang dari kami yang tidak PNS dan dua orang lagi pensiunan, jadi

bagaimanapun sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil di kota Padangpanjang dengan walikotanya tentu harus bisa menjaga hubungan baik, mengenai program pemerintah saya kira tidak ada yang jadi masalah, ada banyak kegiatan pemerintah yang bisa dipastikan Muhammadiyah pasti terlibat dan berperan serta dengan baik”.

“Namun ada satu keputusan Muhammadiyah baru-baru ini yang agak dihiraukan oleh Wali Kota yaitu tentang keputusan mengawali ibadah puasa, waktu itu pak wali tetap pada jadwal yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, padahal sebelumnya Bapak Wali Kota dalam hal yang seperti ini biasanya sepakat dengan Muhammadiyah, tetapi ini tidak menjadi masalah yang besar karena Muhammadiyah saya lihat juga menerima dengan legowo keputusan tersebut”

Wawancara dihari selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2012 dengan Syafril Alwis salah seorang Wakil Ketua PD.Muhammadiyah Kota Padangpanjang di rumah beliau masih terkait dengan Hubungan Muhammadiyah dengan kekuasaan menyampaikan bahwa :

“ Muhammadiyah dalam kepengurusan periode ini sudah memulai dan membangun sebuah komunikasi yang intensif karena kami ingin semua program-program yang telah dirumuskan bisa didukung oleh pemerintah, salah satunya adalah yang saat ini sedang diusahakan sekali adalah adanya alokasi anggaran APBD yang diposkan secara khusus untuk Muhammadiyah Kota Padangpanjang, karena kami meyakini sebagai ormas keagamaan paling besar di Kota Padangpanjang ini dan memiliki amal usaha yang juga bisa menopang program pemerintah dengan anggaran yang jelas tentu dapat mengefektifkan program tersebut”.

Wawancara dengan Musriadi Musyanif tanggal 14 Oktober 2012 di rumah beliau terungkap beberapa hal beliau menyatakan bahwa :

“ Secara spesifik belum pernah ada pola hubungan Muhammadiyah yang begitu fenomenal baik hubungan yang positif maksudnya kerjasama yang besar maupun hubungan negatif yaitu hubungan yang berefek pada ketegangan / konflik antara Muhammadiyah dengan Pemerintah seperti Hubungan Muhammadiyah Pusat dengan Pemerintah SBY saat ini atau lebih pasnya Pak Din dengan SBY. Jadi Semua biasa-biasa saja, berjalan apa adanya karena saya kira kita sama-sama nyaman dengan kondisi ini, Muhammadiyah diberikan dukungan baik moril maupun materil oleh penguasa begitu juga sebaliknya. Secara pribadi mungkin saya yang agak bisa memperlihatkan sikap kritis, itu pun karena profesi saya sebagai seorang wartawan yang mau tidak mau kadang-kadang harus menulis berita apa adanya sesuai fakta terkait kebijakan dan kinerja pemerintah, namun itu tidak pula membuat hubungan Muhammadiyah dengan Pemerintah menjadi tidak baik, jadi secara umum semuanya normal saja”

Selanjutnya pada hari yang sama wawancara dilakukan dengan Edi Rozal salah seorang Wakil Ketua PD.Muhammadiyah Kota PadangPanjang via *Handphone* beliau mengatakan bahwa :

“ Muhammadiyah dan Pemerintah sejak dulu selalu membangun sinergitas untuk saling mendukung, begitu banyak agenda-agenda pemerintah kota yang berkaitan dengan masalah umat mengikutsertakan Muhammadiyah bahkan Muhammadiyah menjadi ujungt ombak dalam ranah implementasinya, begitu juga sebaliknya program-program Muhammadiyah banyak mendapat dukungan baik moral maupun materil. Secara pribadi saya sangat mengetahui bahwa Wali Kota saat ini dekat dengan Muhammadiyah”.

Dari sejumlah wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa pimpinan Muhammadiyah di atas dapat digambarkan bahwa para pimpinan sepertinya sepakat melihat hubungan Muhammadiyah dan Pemerintah relatif baik dalam arti kerja sama yang dibangun hingga saat ini telah mewujudkan berbagai kegiatan yang saling mendukung dalam merealisasikan program Muhammadiyah dan kebijakan Pemerintah

Hubungan ini terjadi karena ada kecenderngan pola budaya politik yang diperankan oleh Muhammadiyah yang berorientasi pada budaya politik yang evaluatif. Menurut Afan Gafar (2002:100) budaya politik evaluatif akan menciptakan perilaku partisipatif dari para individu atau warga Negara dalam merespon kinerja sistem politiknya. Oleh karena itu dalam konteks Muhammadiyah Kota PadangPanjang secara keseluruhan dari hasil wawancara menggambarkan bentuk partisipasi politik yang memadai telah dilakukan oleh para elit pimpinan Muhammadiyah Kota PadangPanjang dalam hubungannya dengan pemerintah

Hal ini dapat dilihat dari keseriusan pada elit untuk selalu berperan serta dalam setiap proses kebijakan yang akan diputuskan oleh pemerintah dengan berbagai macam cara antara lain lobi-lobi individu, ikut serta dalam merumuskan dan mengimplementasikan program, memberikan masukan bahkan sampai pada tahap mempengaruhi anggaran agar ada pos untuk Muhammadiyah dalam melancarkan kegiatan-kegiatan Perserikatan.

D. Deskripsi Tentang Hubungan Elit Pimpinan Muhammadiyah Dengan Partai Politik

Salah satu program utama yang direkomendasikan pada Musyda ke 40 adalah agar pimpinan melakukan pengembangan kerjasama dengan organisasi sejenis dan organisasi politik untuk saling mendukung dalam hal kemaslahatan umat. Organisasi politik yang dimaksud adalah partai politik yang berada di selingkungan kota Padang Panjang.

Dalam konteks ini temuan yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan beberapa elit Pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang agak beragam dari temuan sebelumnya tentang hubungan Muhammadiyah (para pemimpinnya) dengan kekuasaan (Pemerintah). Keberagaman ini muncul karena masing-masing pimpinan punya orientasi sendiri-sendiri tentang partai politik.

Hal ini disebabkan karena adanya sikap Muhammadiyah yang diputuskan dalam Mukhtamar Muhammadiyah di Ujung Pandang tahun 1971 yang menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak akan berafiliasi dengan partai politik manapun secara organisatoris. Tetapi dengan catatan bahwa para anggota/kader Muhammadiyah bebas untuk menyalurkan aspirasi politiknya melalui partai politik yang tidak merugikan Islam. (Syafii Maarif : 1987 : 11). Inilah dasar utama mengapa pada akhirnya dalam urusan parpol para elit Muhammadiyah cenderung agak bersikap berlainan satu sama lainnya.

Satu hal yang menjadikan penelurusan hubungan pimpinan Muhammadiyah dengan Partai Politik lebih menarik adalah bahwa saat ini Kota Padang Panjang secara politik suhunya agak sedikit naik karena tidak berapa lama lagi atau sekitar awal tahun 2013 ini akan digelar pesta rakyat yaitu pemilihan kepala Daerah periode 2013-2018 dimana untuk saat ini sudah mulai bermunculan para calon kandidat yang akan bersaing, dan diantaranya merupakan kader-

kader Muhammadiyah dan tentu akan berharap banyak untuk mendapatkan dukungan dari warga Muhammadiyah yang berada di Padang Panjang yang dianggap punya suara signifikan karena memang kota Padang Panjang merupakan basis Muhammadiyah.

Maka dalam hubungannya dengan Partai politik para pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang dapat digambarkan melalui hasil wawancara peneliti berikut ini. Wawancara dengan Indramadi salah seorang Wakil Ketua di rumahnya pada hari yang sama terungkap beberapa hal aktifitas para elit secara personal dalam hubungannya dengan partai politik antara lain saat ini ada beberapa pimpinan yang mulai intens berkomunikasi dengan salah satu partai.

“ Pak sekretaris contohnya saat ini terlihat sangat dekat dengan Bapak wakil Wali Kota yang notabene saat ini sedang menyiapkan diri untuk terjun di pilkada dalam waktu dekat ini, banyak kegiatan-kegiatan politis seperti menyambangi beberapa parpol yang dianggap bisa nantinya menjadi perahu politiknya, dengan Muhammadiyahpun secara terselubung pak sekretaris juga sering mengajak pak Edwin terlibat dalam beberapa acara Muhammadiyah Kota Padangpanjang”

Dikonfirmasi ke Zulkkarnain Harun Sekretaris Umum PD Muhammadiyah lewat telpon beliau membenarkan kedekatannya dengan Bapak Wakil Wali Kota, beliau menjelaskan bahwa:

“ Kita selalu melakukan komunikasi, sebagai pimpinan Muhammadiyah saya punya hubungan baik dengan pemerintah dalam rangka membangun kerjasama untuk kepentingan masyarakat, namun saat ini memang agak intens, terkait maju di pilkada saya rasa Muhammadiyah punya aturan main yang jelas dalam Khittahnya, namun secara personal tidak ada salahnya saya berusaha mendukung orang Kader Muhammadiyah untuk bisa maju ke kursi Padang Panjang 1 ini.”

Wawancara bersama Bapak Musriadi Musanif di rumahnya pada hari yang sama cukup memberikan gambaran terkait peta hubungan elit Muhammadiyah ini dengan partai politik dia menjelaskan bahwa :

“ saya kira dari sisi ini ada keberagaman yang mencolok dari masing-masing pimpinan. Misalnya Pak Mirdas Ilyas, beliau punya hubungan dekat (family) dengan Suir Syam (Walikota), dulu waktu beliau ketua Muhammadiyah sangat jelas sekali bahwa Muhammadiyah seperti di giring ke Partainya pak Wali Kota yaitu PAN, sementara saat ini pak walikota telah pindah partai ke Gerindra maka bisa saja bapak Mirdas juga akan lebih banyak berkomunikasi

dengan partai itu. Kemudian Bapak IndraMadi, beliau itu dulu adalah sekretaris Umum di PAN kota PadangPanjang, dia punya hubungan psikologis yang cukup kuat dengan PAN, terbukti dia saat ini masih melakukan komunikasi efektif dengan partai tersebut, apalagi digadag-gadag Bapak H. Eko Furkani ketua PAN saat ini juga akan maju di Pilkada nanti. Antara mereka punya kedekatan emosional pula, pak Eko juga kader Muhammadiyah. Lain lagi dengan Bapak edi Rozal yang kita kenal sebagai salah satu deklarator Ormas Nasdem, saat ini telah berdiri pula partai Nasdem dimana para pengurus partai tersebut mayoritas adalah kader terbaik Muhammadiyah kota PadangPanjang, sebut saja Bapak Hamidi mantan Ketua DPRD Kota Padangpanjang beliau Muhammadiyah tulen, kemudia Bapak Yandri Naga sekarang Sekretaris Partai Nasdem beliau mantan ketua majlis Dikdasmen PD.Muhammadiyah Kota Padangpanjang, maka sebagai pimpinan Muhammadiyah Bapak Edi Rozal yang juga deklarator Ormas Nasdem sedikit banyaknya tentu berkeinginan Muhammadiyah menjadi pilar dari kemenangan Partai Nasdem tersebut, ungkap Musriadi”.

Melalui media fecebook peneliti melakukan wawancara dengan Yandri Naga Sekretaris Partai Nasdem yang mana beliau adalah kader Muhammadiyah terkait Hubungan Pimpinan Muhammadiyah saat ini dengan partai yang beliau pimpin, mengungkapkan bahwa :

“ Saya kira kader Muhammadiyah sangat cerdas dalam hal memilih partai yang akan mereka dukung, apalagi Muhammadiyah telah tegas menyatakan memberikan kebebasan kepada kadernya untuk berafiliasi dengan partai manapun, dan yang perlu diingat khittah Muhammadiyah sudah jelas bahwa Muhammadiyah secara organisatoris tidak punya hubungan apapun dengan partai politik manapun,jadi biarkanlah pimpinan tersebut untuk menentukan pilihannya sendiri”.

Wawancara dengan Ketua PD Muhammadiyah Kota PadangPanjang Fahrizal Alwis tentang keberagaman pilihan dan kecendrungan pimpinan terhadap beberapa partai serta sepak terjang yang dimainkan oleh para pimpinan menjelang pemilukada beberapa saat lagi beliau menjelaskan bahwa:

“ Selagi tidak ada aturan main yang dilanggar semuanya tidak menjadi masalah, mereka punya naluri politik masing-masing, mereka punya daya tarik masing-masing pula termasuk daya tarik mereka sebagai pengurus Muhammadiyah, yang penting jangan menjadikan Muhammadiyah sebagai mesin politik, artinya harus bisa menempatkan diri sebagai personal dan sebagai pimpinan, kalaupun kerjasama Muhammadiyah dengan tokoh politik itu sudah sering dilakukan, jadi tidak menjadi persoalan. Muhammadiyah tetap menjadi ormas keagamaan yang selalu aktif melakukan kerjasama dengan semua pihak demi kepentingan umat”

Dari petikan hasil wawancara diatas dapat digambarkan betapa para pimpinan Muhammadiyah Kota PadangPanjang menunjukkan keberagaman yang cukup banyak dalam

menentukan pilihan terhadap hubungan dengan partai politik yang ada di Kota Padang Panjang. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka. Setidaknya alasan identifikasi primordial dan pengaruh personal cukup kental mempengaruhi preferensi mereka. Identifikasi primordial misalnya di tunjukan karena pengaruh kekerabatan, kesukusan, kedaerahan dan adat istiadat/tradisi. Sementara faktor personal biasanya dilatari oleh ketokohan atau figur yang ada disuatu kelompok. (Sudijono Sastroatmojo: 1995:228)

E. Karakteristik dan Faktor Pendorong Perilaku Elit Pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang

Dinamika hubungan elit Muhammadiyah dengan kekuasaan (Pemerintah) yang telah digambarkan dimuka dengan memaparkan beberapa hasil wawancara dengan para Pimpinan Muhammadiyah Kota Padang Panjang terlihat bahwa masing-masing pimpinan mengemukakan Pemerintah Kota Padang Panjang selama ini telah memberikan kontribusi yang begitu banyak terhadap dinamika kinerja Pimpinan dalam melaksanakan program-program penting Muhammadiyah, dilain pihak Para elit Muhammadiyah juga sependapat bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota juga tidak satupun yang menyimpang atau berlawanan dengan khittah perjuangan Muhammadiyah.

Ada dua pola atau karakteristik yang dianggap akan menjadi pilihan dalam melihat perilaku politik elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang yaitu pertama Karakteristik Kooperatif-kritis yang ditandai dengan sikap dan perilaku jika berhadapan dengan suprastruktur (kekuasaan) para elitnya tidak pernah berupaya untuk hanya sekedar mengambil hati (menjilat) penguasa agar terus bisa langgeng, namun harus bersikap obyektif, rasional, adil, bijak dan representative. Dalam hal ini mestinya pada pimpinan Muhammadiyah harus secara tegas pula menunjukkan sikap kritis yang konstruktif terhadap penguasa.

Kemudian yang kedua adalah karakteristik Kooperatif – Akomodatif, Perilaku ini cenderung digambarkan dengan dekatnya para elit Muhammadiyah dengan penguasa, dengan saling mendukung program satu sama lain. Terjadi begitu banyak consensus sehingga kurang mampu bersikap kritis karna lebih akomodatif.

Maka kesimpulan yang dapat ditarik dari kenyataan yang didapat dalam penelitian ini adalah bahwa karakteristik perilaku politik elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang periode 2010-2015 saat ini kecendrungan mengarah pada pola/karakteristik perilaku politik yang Kooperatif-Akomodatif.

Sementara itu dalam hubungannya dengan partai politik para elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi pendorong bagi mereka untuk melakukan kegiatan komunikasi bahkan mendukung salah satu partai politik yang ada di Kota Padang Panjang adalah karena pertama karena faktor hubungan primordial yaitu Faktor primordial antara lain berupa kekerabatan, kesukuan, kebahasaan, kedaerahan, dan adat istiadat. Dengan demikian ketika seseorang mengeskpresikan perilaku politiknya, kemungkinan yang bersangkutan menyandarkannya kepada faktor kekerabatan, satu suku, bahasa, daerah, dan adat istiadat, setidaknya demikianlah yang perlihatkan oleh salah seorang Pimpinan yaitu Mirdas Ilyas.

Kemudian faktor yang kedua adalah karena Faktor personal biasanya disandarkan kepada seseorang. Ketokohan seseorang menjadi identifikasi suatu kelompok masyarakat. Dalam mengekspresikan perilaku politiknya, suatu masyarakat melihat perilaku politik yang diperlihatkan oleh sosok yang menjadi panutannya. Dalam hal ini dapat dipahami ketika seseorang mampu mengidentifikasi para tokoh dengan segala rekam jejaknya, termasuk partai

politiknya. Hal inilah yang diperlihatkan oleh beberapa pimpinan Muhammadiyah seperti yang dilakukan oleh Indra Madi, Zulkarnain Harun, dan lainnya.

Pada pimpinan yang lain, selain nama-nama yang telah disebutkan dalam wawancara tadi pada hakekatnya memiliki pandangan yang sama soal hubungan mereka dengan Parpol, Sebagian besar pimpinan yang merupakan Pegawai Negeri Sipil tentu tidak akan leluasa berhubungan dengan parpol tetapi berhubungan dengan tokoh parpol apalagi mereka kader Muhammadiyah terus dilakukan dengan sangat hangat.

Beberapa fakta yang lain adalah pimpinan yang lain memiliki kecendrungan yang berbeda, misalnya Defrial Anwar dan Abdul Gafar lebih sering terlihat beraktifitas dengan Bapak Zulkarnain Harun yang nota bene saat ini sedang intens dengan Bapak Edwin Wakil Wali Kota Padang Panjang yang juga akan maju dalam Pilkada. Kemudian Syafril Alwis dan Zulpiadi Hutabarat merapat ke kubunya Indra Madi yang lebih intens berhubungan dengan PAN, begitu juga pimpinan yang mengarah orientasi parpolnya ke Partai Nasdem.

Namun intinya seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PD Muhammadiyah Kota Padang Panjang Bapak Fahrizal Alwis bahwa, sebagai pribadi para pimpinan Muhammadiyah ini memiliki kebebasan untuk mengisi ruang politik dimana dan kapanpun asal dengan catatan penting jangan membawa Muhammadiyah secara organisasi terlibat dalam praktek politik praktis.

Harapannya adalah setiap serbang terjang yang dimainkan para elit Muhammadiyah ini hendaknya memiliki nilai tambah bagi organisasi Muhammadiyah Kota Padang Panjang dalam rangka merealisasikan program-program kerja yang telah dirumuskan demi kepentingan Umat dan mengembangkan amal usaha Muhammadiyah.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pola atau karakteristik perilaku elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang dalam hubungannya dengan kekuasaan yaitu Pemerintah Kota Padang Panjang terkait dengan peran Muhammadiyah dalam proses kebijakan Pemerintah mempunyai kecenderungan pada karakteristik yang Kooperatif-Akomodatif yaitu mampu selalu berpartisipasi aktif dan bekerjasama secara baik tanpa ada terindikasi konflik walaupun sedikit. Akomodatif artinya Para pimpinan Muhammadiyah merasa semua kebijakan Pemerintah Kota sejalan dan sesuai dengan agenda Masyarakat secara Umum serta Muhammadiyah secara Khusus.
2. Sementara Faktor yang mendorong pimpinan/elit Muhammadiyah melakukan Hubungan dengan Partai Politik dipengaruhi pada dua hal yang mendasar yaitu faktor identitas Primordial yaitu memilih dekat dengan partai atau tokoh politik karena ada kedekatan hubungan pribadi seperti family dan kedekatan tradisi seperti karena Orang Muhammadiyah. Kedua karena faktor Personal yaitu kedekatan para elit dengan tokoh atau figure dari partai tersebut baik karena Muhammadiyahnya maupun karena kedekatan emosional elit dengan tokoh tersebut.
3. Perilaku politik yang semacam ini tidak mengganggu secara banyak terhadap kinerja perserikatan Muhammadiyah Kota Padangpanjang, walaupun ada sedikit keberagaman pandangan namun tidak mempengaruhi organisasi dalam mengembangkan kegiatan yang telah dirumuskan.

B. SARAN

1. Sebagai Ormas Islam yang cukup punya pengaruh di Kota Padang Panjang mestinya Para elit / Pimpinan Muhammadiyah harus bisa meningkatkan naluri kritisnya terhadap semua program dan kebijakan pemerintah kota. Bekerjasama tentu merupakan satu hal yang harus dipelihara, namun sebagai civil society Muhammadiyah yang di pelopori oleh elitnya bisa menjaga jarak untuk mengefektifkan fungsi pengawasan, fungsi katalisasi, dan fungsi kritis sehingga Muhammadiyah bisa menyuarakan aspirasi akar rumpun dengan baik dan berani.
2. Dengan banyak kader Muhammadiyah yang terjun ke panggung politik praktis hendaknya pada elit juga menyeleksi kader potensial yang punya peluang besar untuk dapat menduduki kursi kekuasaan dengan malakukan diskusi internal secara formal sehingga walaupun merupakan pilihan personal sedikit banyaknya tentu akan mempengaruhi citra Muhammadiyah, oleh karena itu keberagaman tersebut bisa dikelola secara elegan.
3. Bagi Muhammadiyah secara organisasi melalui pimpinan disarankan untuk lebih membuat program-program yang memiliki dampak empiric bagi warga Muhammadiyah secara Khusus dan Masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Politi.*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama,
- Creswill, W. John W. 1998. *Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches*, Jakarta. KIK Press
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Idrus, Muhammad. 2002. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial (Pendekatan Kualitatif&Kuantitatif)*, Yogyakarta, UII Press.
- Kavanagh, Denis. 1983. *Political Science and political Behavior*. London.George Allen & Unwin Ltd.
- Keller, Suzane. 1995. *Penguasa dan Kelompok Elit:Peranan Elit Penentu Dalam Masyarakat Modern*, terjemahan Zahara D. Noer . Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010 *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Penerbit Gava Media
- Lidle, R. William. 1996 *Leadership and Culture in Indonesian Politics*. Syenyee: Allen&Unwin.
- Mardalis. 2006. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta, Bumi Aksara,
- Miles, M.B dan A.M. Huberman, 1992. *Analisis Data Kualitatif*: Penerjemah Tjetjep Rohidi. Jakarta. UI Press
- Moleong, J. Lexy . 2002 *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung. Yayasan Obor Indonesia.
- Rais, M. Amin. 1997. *Visi dan Missi Muhammadiyah*. Yogyakarta. Pustaka Suara Muhammadiyah.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995 *Perilaku Politik*, Semarang: IKIP Semarang Press.
- Shabron, Sudarno. 2003 *Muhammadiyah dan NU dalam Pentas Politik Nasional*, Surakarta. Muhammadiyah University Press.
- Singarimbun, Masri. (1982) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta. LP3ES
- Sunaryo (2000) *Fenomena Politik Muhammadiyah dalam Muhammadiyah Digugat*. Jakarta Kompas

- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suwarno. 2001. *Muhammadiyah Sebagai Oposisi*. Yogyakarta. UII Press.
- Thoha, Miftah. 1983 *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Jakarta. Rajawali Pers.
- Plano, C. Jack, Robert E. Riggs dan Helenan S Robin. 1989 *Kamus Analisa Politik*, Jakarta: Rajawali Press.
- Woshinsky, H. Oliver. 1995. *Culture and politics An Introduction to Mass and Elite Political Behavior*, New Jersey: Prentice Hall.

B. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Sirajuddin_Syamsuddin

<http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>

[http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/05/lnua4p-prediksi-bkkbn-2011-
penduduk-indonesia-241-juta-jiwa](http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/07/05/lnua4p-prediksi-bkkbn-2011-penduduk-indonesia-241-juta-jiwa)



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Mr. Asaat No. 14, Lapangan Kantin Kota Padang Panjang
Telp. ☎ (0752) 485395 Fax. ☎ (0752) 485395

REKOMENDASI

Nomor : 070/293/KPPT-PP/X-2012

Tentang
Izin Melaksanakan Penelitian

Setelah mempelajari Surat dari Bapak/Ibu Ketua Lembaga Penelitian UNP Nomor : 08/UN35.2/PG/2012 Tanggal 7 September 2012 perihal Izin Penelitian maka dengan ini kami menyatakan tidak keberatan atas maksud melaksanakan Penelitian / Permintaan Data di Kota Padang Panjang yang dilakukan oleh:

Nama : **ADIL MUBARAK, S.IP,M.Si**
Tempat /Tanggal Lahir : Padang, 08 Januari 1979
Alamat : Jl.Ikhlas XIII No.13 RT.05 RW.009 Andalas Padang Timur
No. Kartu Identitas : 1371020801790003
Pekerjaan : Dosen UNP
Judul Penelitian : " Perilaku Politik Elit Muhammadiyah Kota Padang Panjang"
Lokasi Penelitian : Kota Padang Panjang
Waktu Penelitian : 31 Oktober 2012 s/d 31 Januari 2013

Sebelum melakukan penelitian, peneliti diwajibkan/diharuskan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Peneliti harus melaporkan diri kepada pihak yang berwenang di tempat penelitian.
- Penelitian dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di tempat penelitian.
- Peneliti diwajibkan menyampaikan laporan hasil penelitian kepada Walikota Padang Panjang melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang.
- Peneliti dilarang melakukan penelitian di luar hal-hal yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang di tempat penelitian.
- Apabila penelitian yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, maka izin penelitian ini dicabut kembali.

Demikianlah izin penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, 31 Oktober 2012

An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA PADANG PANJANG



NULDRYMAN, SH,MM

Pembina Tk.I / NIP. 19670205 199312 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth Bapak :

- Walikota Padang Panjang Cq BPBD Kesbangpol di Padang Panjang
- Pimpinan Daerah Muhammadiyah PABASKO
- Arsip



PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN WILAYAH MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
Nomor : 59/KEP/II.0/D/2011**

Tentang :

**PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2010 - 2015**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat :


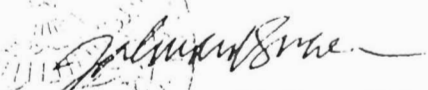
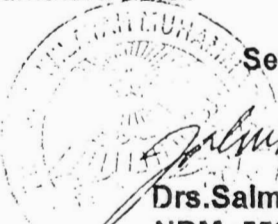
- Memperhatikan : Surat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto nomor : 277/III.0/A/2011 tanggal 26 Jumadil Akhir 1432 H/30 Mei Maret 2011 M perihal : permohonan penerbitan SK PDM Pabasko;
- Menimbang : 1. Bahwa untuk kesempurnaan dan ketertiban jalannya Persyarikatan perlu segera menetapkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015;
2. Bahwa nama-nama yang diusulkan untuk jabatan tersebut telah memenuhi syarat untuk diangkat dan ditetapkan;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 26 dan 29;
2. Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 25 dan 28;
- Berdasarkan : Pembicaraan dan Keputusan Rapat Pleno ke-25 Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat tanggal 07 Juni 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Saudara **Drs.Fahrizal Alwis** sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto Periode 2010 – 2015.
- Kedua : Menetapkan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto Periode 2010 – 2015 sebagai berikut:
- Ketua : Drs.Fahrizal Alwis
Anggota : Joni Nasri, S.Ag
Anggota : Zulpiadi Hutabarat, S.Ag., MA
Anggota : Syafril Alwis, S.Ag
Anggota : Dr.H.Adirozal, M.Si
Anggota : Indramadi, S.Ag
Anggota : Drs.Zulkurnain Harun, M.Si
Anggota : Abdul Gafar, S.Ag
Anggota : Drs.H.Harmaini. L, MM
Anggota : Drs. Sunar TS
Anggota : Musriadi Musanif, S.Th.
Anggota : Dafrial Anwar, S.Ag
Anggota : H.Mirdas Ilyas, S.Ag
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai akhir periode jabatannya, atau diadakan perubahan atau dicabut kembali.
- Ketiga : Menyampaikan surat keputusan ini kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 06 Rajab 1432 H
08 Juni 2011 M

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah
Sumatera Barat

Ketua,	Sekretaris,
	
Drs.H.Dasril Ilyas NBM. 667 582	 Drs.Salman M. Noer, M.Pd NBM. 552 724

Tembusan :

1. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta / Jakarta
2. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Padang Panjang Batipuh X Koto
Nomor : 02 / Kep / III, O / D / 2011
Tanggal : 18 Syaban 1432 H / 20 Juli 2011

No	Nama	Jabatan
1	Drs. Fahrizal Alwis ✓	Ketua
2	H. Mirdas Ilyas, S.Ag ✓	Wakil Ketua Sebagai koordinator a. Majelis Tarjih dan Tajdid b. Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting
3	Syafril Alwis, S.Ag ✓	Wakil Ketua Sebagai koordinator Majlis Tabligh dan Dakwah Khusus ✓
4	Musriadi Musanif, S.Th.I	Wakil Ketua Sebagai koordinator a. Majelis Dikdasmen ✓ b. LPPK
5	Indra Madi, S. Ag ✓	Wakil Ketua Sebagai koordinator Majlis Pendidikan Kader
6	Drs. Sunar, TS ✓	Wakil Ketua Sebagai koordinator a. Majelis Pelayanan Sosial dan Kesehatan b. Lembaga Penanggulangan Bencana
7	Dr. H. Adirozal, M.Si	Wakil Ketua Sebagai koordinator a. Majelis Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat ✓ b. Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
8	Drs. H. Harmaini LMM ✓	Wakil Ketua Sebagai koordinator a. Majelis wakaf, dan keharta bendaan b. Lembaga ZIS
9	Drs. Zulkarnaini Harun, M.Si	Sekretaris
10	Zulfiadi Hutabarat, S.Ag, M.Si ✓	Wakil Sekretaris
11	Joni Nasri, S.Ag ✓	Wakil Sekretaris
12	Abdul Gafar, S.Ag ✓	Bendahara
13	Defrial Anwar, S.Pd.I ✓	Wakil Bendahara

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : **18 Syaban 1432 H**
20 Juli 2011 M

Nashrun Minallah Wa fathun Qariib

PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO

Ketua

Sekretaris

Drs. FAHRIZAL ALWIS
NKTAM : 566626

Drs. ZULKARNAIN HARUN, M.Si
NKTAM. 927957

3. NAMA-NAMA MAJELIS Nama Majelis dan Pengurusnya :

MAJELIS TARJIH DAN TAJDID

Koordinator	: Drs. H. Mirdas Iliyas
Ketua	: Gusharia Putra, S.Ag, MA.
Wakil Ketua	: Zuriadi, S.Pd.I
Sekretaris	: Zulkifli, S.Ag, MA / S.Pd.I, M.Pd.I.
Anggota	: Ade Sehabuddin, SH, MM
	: Wahyu Salim, S.Ag

MAJELIS TABLIH DAN DAKWAH KHUSUS

Koordinator	: Syafril Alwis, S.Ag
Ketua	: Hasanuddin, S.Ag
Wakil Ketua	: Rafles Dt. Mangkuto Nan Itam
Sekretaris	: Arab Mustakribah. S.Pd.I
Anggota	: Drs. H.M. Taher Hanif, MA
	: Syafnal, S.Ag
	: Chandra Yuheri, SPd.I

MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Koordinator	: Musriadi Musanif, S.Th.I
Ketua	: Drs. Amel Dahlan
Wakil Ketua	: Alfiar, M.Pd
Sekretaris	: Yurmitanto
Anggota	: Surya Eka Prianan, ST
	: Drs. Harisman, M.Si
	: Drs. Erichiyat Putra

MAJELIS EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Koordinator	: Dr. H. Adirozal, M.Si
Ketua	: H. Erwan Yunus, SE
Wakil Ketua	: Drs. Syamsul Anwar, MM
Sekretaris	: Yuska Putra, S.Pd
Anggota	: Erianto, S.Pd
	: Suheri, S.Pd.I
	: Hendriko

MAJELIS PELAYANAN SOSIAL DAN KESEHATAN

Koordinator	: Drs. Sunar. TS
Ketua	: dr. H. Mawardi, M.Kes
Wakil Ketua	: Suharman, S.Ag
Sekretaris	: Drs. Syahrul
Anggota	: Drs. Nuryanuwar, Apt. MM. M.Kes
	: Agus Salim, S.Pd.I

MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN

Koordinator	: Drs. H. Harmaini L.MM
Ketua	: D. Dt. Sinaro Mudo, S.Pd.I
Wakil Ketua	: Sukniadi
Sekretaris	: Buchari, Dt. Lelo Marajo, S.Th.I
Anggota	: Erizal, S.Pd.I
	: Nasril Dt. Tanbaro, S.Pd



**TANFIDZ KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH KE 40
MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO**

**DISELENGGARAKAN
PADA TANGGAL**

**26 SAMPAI 27 JUMADIL AWAL 1532 H
30 APRIL sampai 01 MEI 2011 M**

**BERTEMPAT
KAUMAN MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG**

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO**



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG-BATIPUH-X KOTO**

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
NO : 04 / KEP / II.O / D / 2011**

TENTANG

**TANFIDZ KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH KE 40 MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko

- Memperhatikan** : Keputusan Musyawarah Daerah ke-40 Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto tanggal 26-27 Jumadil Awal atau bertepatan dengan tanggal 30 April-1 Mei 2011;
- Menimbang** : 1. Bahwa Keputusan Musyawarah Wilayah ke-40 telah diambil secara sah sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
2. Bahwa oleh karena itu perlu segera ditanfidzkan dengan surat keputusan agar segera dapat dilaksanakan;
- Mengingat** : Anggaran Dasar Muhammadiyah, Pasal 12, 25 dan 34;
Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Pasal 8, 11, 15, 24 dan 30;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO TENTANG TANFIDZ**



**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH KE-40
MUHAMMADIYAH PABASKO**

- Pertama : Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah ke-40 yang dilangsungkan pada tanggal 26-27 Jumadil Awal atau bertepatan dengan tanggal 30 April-1 Mei 2011 di Padang Panjang seperti terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Keputusan Musyawarah Daerah ke-40 tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan di tingkat Cabang dan Ranting, kecuali keputusan yang memerlukan tindak lanjut akan disusun dalam aturan tersendiri
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

Nashrun Minallah Wa fathun Qariib

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 09 Dzulkaedah 1432 H
07 Oktober 2011 M

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO**

Ketua

Drs. FAHRIZAL ALWIS
NKTAM : 566626

Sekretaris


Drs. ZULKARNAIN HARUN, M.Si
NKTAM. 927957

Tembusan :

1. PP Muhammadiyah Yogya / Jakarta
2. PWM Sumatra Barat di Padang
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X
Koto Nomor : 02 / Kep / III. O / D / 2011 tanggal 09 Dzulkaedah 1432 H / 07 Oktober
2011 M

**KEPUTUSAN MUSYAWARAH DAERAH KE-40
MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO**

Musyawarah Daerah ke-40 yang diselenggarakan pada tanggal tanggal 26-27 Jumadil Awal atau bertepatan dengan tanggal 30 April-1 Mei 2011 bertempat di Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, setelah menyimak dan mencermati dengan seksama :

1. Sambutan Wakil Walikota Padang panjang, Ir. H. Edwin, SP
2. Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat Drs. Ha. Dasril Iliyas
3. Pidato Iftitah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto, Drs. H. Misdas Iliyas.
4. Laporan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto.
5. Program Daerah Muhammadiyah Pabasko 2010-2015.
6. Rekomendasi Musyawarah Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto
7. Hasil Pemilihan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto, Periode 2010-2015.
8. Tanggapan, pendapat, pembahasan, saran dan usul-usul peserta Musyda yang disampaikan dalam sidang pleno dan sidang komisi.

MEMUTUSKAN

I. PIMPINANAN DAERAH MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 2005-2010

A. Mengesahkan hasil pemilihan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015 sebanyak 13 orang dari hasil pemilihan 39 calon yang diajukan oleh Musyawarah Pimpinan, sesuai perolehan suara, sebagai berikut :

1. Joni Nasri, S.Ag
2. Drs. Fahrizal Alwis
3. Zulfiadi Hutabarat, S.Ag. M.Si
4. Syafril Alwis, S.Ag
5. Dr. H. Adirozal, M.Si
6. Indra Madi, S. Ag
7. Drs. Zulkarnain Harun, M.Si
8. Abdul Gafar, S.Ag
9. Drs. H. Harmaini L.MM
10. Drs. Sunar. TS
11. Musriadi Musanif, S.Th.I
12. Defrial Anwar, S.Pd.I
13. H. Mirdas Ilyas, S.Ag.

B. Menetapkan Drs. Fahrizal Alwis sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015.

II. LAPORAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO PERIODE 2010-2015.

Menerima laporan Pimpinan Daerah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2005-2010 dengan beberapa catatan sebagaimana tersebut dalam lampiran 1.

III. PROGRAM DAERAH MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO 2010-2015.

Mengesahkan Rancangan Program Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015 sebagai program Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015 sebagai tersebut dalam lampiran 2.

IV. REKOMENDASI MUSYAWARAH DAERAH KE-40 MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO

Mengesahkan Rancangan Rekomendasi Musyawarah Daerah Padang Panjang Batipuh X Koto ke-40 sebagai Rekomendasi Musyawarah Daerah Padang Panjang Batipuh X Koto sebagaimana tersebut dalam lampiran 3.

V. PENGORGANISASIAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO.

Mengesahkan Rancangan Pengorganisasian Pimpinan Daerah Padang Panjang Batipuh X Koto sebagai Pengorganisasian Pimpinan Daerah Padang Panjang Batipuh X Koto sebagai tersebut dalam lampiran.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada tanggal : 09 Dzulkaedah 1432 H
07 Oktober 2011 M

Pimpinan Sidang,

H. Mirdas Iliyas, S.Ag



Lampiran 1

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH KE-40**

TENTANG

**LAPORAN PIMPINAN MUHAMMADIYAH DAERAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2005-2010**

Menerima Laporan Pimpinan Daerah Padang Panjang Batipuh X Koto dengan catatan sebagai berikut :

1. Untuk pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko periode 2010-2015 diharapkan diisi oleh orang-orang yang bisa bekerja, punya komitmen, dan waktu.
2. Pembinaan yang intensif terhadap cabang dan ranting Muhammadiyah se Pabasko.
3. Penyusunan Statuta permanen bagi seluruh badan-badan dan lembaga dibawah lingkungan kerja PDM Pabasko.
4. Melakukan evaluasi kinerja PDM secara menyeluruh setahu sekali.
5. Melakukan reshuffel terhadap unsur pimpinan yang tidak dapat mematuhi aturan persyarikatan.
6. Penetapan sistem pergantian ortom yang harus direkomendasikan oleh persyarikatan, baik sebelum maupun sesudah penyelenggaraan pergantian pimpinan ortom.

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH KE 40**

TENTANG

**PROGRAM MUHAMMADIYAH PABASKO
PERIODE 2010-2015**

A. PENDAHULUAN

Program Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko Masa Jabatan 2010-2015 adalah merupakan penjabaran dari program Muhammadiyah hasil Mukhtamar ke-46 yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 20-25 Rajab 1431 H/03-08 Juli 2010 M dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pada program ini ditetapkan dua aspek yaitu visi pengembangan dan program pengembangan. Visi pengembangan adalah kondisi atau keadaan yang ingin diwujudkan sebagai tujuan dari setiap program Muhammadiyah. Adapun program pengembangan yakni rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kemudian pada program ini juga dikelompokkan kepada dua aspek yaitu program umum dan program khusus. Program umum merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat lintas, aspek dan lintas majelis /lembaga tertentu yang koordinasinya langsung atau majelis/lembaga tertentu atau badan lain yang dimandati Pimpinan Persyarikatan untuk menjadi koordinator. Adapun program perbidang merupakan rencana kegiatan yang bersifat aspek tertentu.

B. TUJUAN PROGRAM

1. Meningkatkan dan berkembangnya organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern.

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH KE 40**

TENTANG

**PROGRAM MUHAMMADIYAH PABASKO
PERIODE 2010-2015**

A. PENDAHULUAN

Program Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko Masa Jabatan 2010-2015 adalah merupakan penjabaran dari program Muhammadiyah hasil Mukhtamar ke-46 yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 20-25 Rajab 1431 H/03-08 Juli 2010 M dan disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pada program ini ditetapkan dua aspek yaitu visi pengembangan dan program pengembangan. Visi pengembangan adalah kondisi atau keadaan yang ingin diwujudkan sebagai tujuan dari setiap program Muhammadiyah. Adapun program pengembangan yakni rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kemudian pada program ini juga dikelompokkan kepada dua aspek yaitu program umum dan program khusus. Program umum merupakan rangkaian kegiatan yang bersifat lintas, aspek dan lintas majelis / lembaga tertentu yang koordinasinya langsung atau majelis/ lembaga tertentu atau badan lain yang dimandati Pimpinan Persyarikatan untuk menjadi koordinator. Adapun program perbidang merupakan rencana kegiatan yang bersifat aspek tertentu.

B. TUJUAN PROGRAM

1. Meningkatkan dan berkembangnya organisasi dan jaringan untuk menjadi gerakan Islam yang maju, profesional, dan modern.

2. Meningkatkan dan berkembangnya sistem gerakan clan amal usaha yang unggul dan mandiri.
3. Meningkatkan dan berkembangnya peran strategis Muhammadiyah dalam kehidupan umat.

C. KONDISI SOSIAL MASYARAKAT PABASKO

1. Kondisi Umum

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) telah merubah pergeseran nilai dan perubahan sosial yang sangat dahsyat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai pola kehidupan antara lain :

- a. Munculnya pola hidup deislamisasi (kedangkalan aqidah) yang ditandai dengan berkembangnya penyakit TBC (Tahayul, Bid'ah, dan Churafat) serta syirik.
- b. Munculnya pola hidup demoralisasi (kemerosotan akhlak) yang ditandai dengan penyakit masyarakat antara lain : perampokan, perkosaan, pencurian, perjudian, pornografi dan lain-lain.
- c. Munculnya permurtadan dengan memanfaatkan situasi gempa untuk memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan yang bertujuan permurtadan.
- d. Dikalangan masyarakat tertentu muncul pola hidup materialistik, cinta kebendaan dan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak-banyak, cinta dunia dan melupakan akhirat dan nilai-nilai agama mulai dilupakan.
- e. Dalam batas tertentu juga terlihat pola hidup individualistik mementingkan diri sendiri, tidak ada kepekaan sosial dan terjadinya kerenggangan sosial, mundurnya nilai-nilai ukhuwah Islamiyah.
- f. Bertambahnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yang ditandai dengan banyaknya pengemis dan masyarakat penerima raskin (beras miskin).
- g. Dalam bidang pendidikan belum meratanya kesempatan untuk memperoleh pendidikan. karena biaya sekolah yang cukup tinggi serta penerimaan mahasiswa dengan kelas reguler dan non reguler (biaya tinggi).

- h. Dalam bidang kesehatan masih terbatasnya pelayanan kesehatan baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

2. Kondisi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan yang akan memandu umat kepada masyarakat Islam yang sebenar-benarnya juga tidak luput dari berbagai permasalahan, antara lain :

- a. terbatasnya kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh pimpinan dan warga muhammadiyah seperti:
- kompetensi keilmuan dan wawasan islam dan kemuhammadiyahannya sehingga masih ada sementara pimpinan dan warga yang belum memahami hakikat islam, visi dan ajaran islam, hakekat muhammadiyah, anggaran dasar, ART, MKCH, kepribadian dan kaidah – kaidah lainnya
 - Kompetensi metodologi yang berkaitan dengan cara – cara pengembangan muhammadiyah
 - Kompetensi kepribadian yang berkaitan keyakinan dan ketaqwaan, keikhlasan, kejujuran, kedisiplinan, dan rendahnya etos kerja dan lain – lain
- b. Kurangnya rasa memiliki, rasa berpartisipasi dan rasa bertanggung jawab dikalangan sementara pimpinan dan warga Muhammadiyah sehingga perkembangan Muhammadiyah dalam batas tertentu terasa sedikit lamban.
- c. Belum terlaksananya revitalisasi ranting dan cabang Muhammadiyah secara optimal sehingga ada ranting dan cabang yang belum memenuhi ketentuan AD dan ART.
- d. Dalam bidang pendidikan, masih terlihat tidak adanya keseimbangan antara kuantitas amal usahanya dengan kualitas yang dimilikinya, sehingga lebih terkesan jumlah banyak dan kualitas kurang.
- e. Dalam bidang ekonomi, meskipun sudah ada BMT dan BPR dan telah mencatat beberapa keberhasilan tetapi hanya terbatas pada daerah tertentu, sedangkan

daerah-daerah lain masih ada yang belum memiliki lembaga ekonomi ini, sedang rakyat yang membutuhkan pada lembaga ini cukup banyak.

- f. Dalam bidang kesehatan, meskipun sudah ada rumah sakit dan klinik tetapi terbatas pada daerah tertentu dan daerah lain belum memiliki.
- g. Dalam bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat meskipun sudah ada banyak memiliki panti asuhan, namun kualitas pembinaan masih dipertanyakan.

D. PRIORITAS PENGEMBANGAN

Berdasarkan kondisi sosial masyarakat Pabasko dan Muhammadiyah secara umum, maka prioritas program dititik beratkan kepada hal-hal berikut :

1. Peningkatan dan pengembangan kuantitas dan kualitas ranting dan cabang sebagai basis penguatan, pemberdayaan, dan perluasan gerakan Muhammadiyah di akar rumput.
2. Peningkatan dan pengembangan sistem gerakan yang ditekankan pada pengayaan kualitas ideologi dan pemikiran yang menjadi basis bagi pengembangan nilai-nilai keagamaan, dan intelektualitas.
3. Peningkatan dan pengembangan kualitas sumberdaya anggota dan kader sebagai pelaku gerakan yang mampu memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat.
4. Peningkatan dan pengembangan amal usaha dan praksis sosial Muhammadiyah yang unggul dengan mempertuas program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan dan pengembangan peran strategi Muhammadiyah dalam kehidupan masyarakat yang berbasis pada kualitas kepribadian, kemandirian, pencerahan, pembebasan, dan pencerahan.

E. CIRI PENGEMBANGAN

Dalam penyusunan program periode 2010-2015 ditetapkan ciri pengembangan yang mengandung aspek-aspek tertentu yang penting, strategis, dan memiliki pengaruh yang

menentukan serta harus diwujudkan secara terukur dalam gerakan Muhammadiyah. Adapun ciri-ciri pengembangan program Muhammadiyah adalah sebagai berikut :

1. Sistem Gerakan

Hal yang berkaitan dengan aspek-aspek nilai dan konsep, yang berkaitan dengan hal-hal mendasar dalam gerakan Muhammadiyah.

- a. Menguatnya sistem gerakan Muhammadiyah yang maju, profesional, dan modern.
- b. Dilandasi keikhlasan dan komitmen dari seluruh anggotanya.
- c. Menguatnya pemahaman ideologi dan visi gerakan Muhammadiyah.

2. Organisasi dan Kepemimpinan.

Hal yang berkaitan dengan kelembagaan dan Kekuatan penggerak dalam Muhammadiyah:

- a. Menguatnya sistem manajemen organisasi Muhammadiyah yang dinamis dan produktif.
- b. Menguatnya sistem kepemimpinan kolektif-kolegial yang transformatif yang mampu memberikan keteladanan, memobilisasi potensi, memproyeksikan masa depan, dan mengagendakan perubahan.
- c. Perluasan organisasi dan kepemimpinan daerah, cabang, dan ranting sebagai basis gerakan di tingkat bawah.
- d. Tersusunnya rancangan dan terlaksananya perintisan restrukturisasi organisasi yang bercorak gerakan.

3. Jaringan

Hal yang berkaitan dengan hubungan internal dan eksternal Muhammadiyah.

- a. Menguatnya peran dan jaringan keumatan, dan kebangsaan.
- b. Amal usaha, kegiatan, dan perangkat persyarikatan.
- c. Menguatnya hubungan dan kerjasama dengan berbagai pihak.

4. Sumberdaya

Hal yang berkaitan dengan aspek pendukung dan pelaku gerakan Muhammadiyah.

- a. Terlaksananya pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan anggota Muhammadiyah.
- b. Terlaksananya sistem kaderisasi dan regenerasi dalam Muhammadiyah secara konsisten dan berkelanjutan.
- c. Meningkatnya jumlah simpatisan sebagai basis rekrutmen anggota Muhammadiyah.
- d. Terlaksananya sistem pengelolaan sumber-sumber dana, harta kekayaan, dan aset persyarikatan secara transparan, akuntabel, dan konsisten.

5. Aksi dan Pelayanan

Hal yang berkaitan dengan aktivitas secara langsung dan dapat dinikmati hasilnya oleh anggota Muhammadiyah dan masyarakat luas.

- a. Terbangunnya sinergi pelayanan publik sebagai wahana untuk menumbuhkembangkan Islamic Civil Society
- b. Terlaksananya pelayanan publik melalui amal usaha, program, dan kegiatan Muhammadiyah yang berkualitas.
- c. Terlaksananya fungsi advokasi dalam pelayanan dan kebijakan publik dari gerakan Muhammadiyah.

F. PROGRAM UMUM PERSYARIKATAN

1. Program Konsolidasi Ideologis

a. Visi Pengembangan

Teraktualisasinya prinsip-prinsip, idealisme dan konsep-konsep dasar gerakan yang menunjukkan keunggulan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang maju/modern serta berperan aktif-strategis dalam dinamika kehidupan umat, bangsa dan perkembangan global.

b. Program Pengembangan

1. Mengintensifkan pembinaan ideologi di seluruh lingkungan organisasi termasuk di amal usaha, majelis/lembaga, organisasi otonom Muhammadiyah melalui berbagai usaha yang terintegrasi.
2. Mengintensifkan dan memasyarakatkan Manhaj Gerakan Muhammadiyah (Muqadimah, Kepribadian, Khitah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup, Pedoman Hidup Islami, dan lain-lain) sebagai sumber inspirasi, acuan, dan tuntunan dalam lingkungan organisasi dan anggota persyarikatan.
3. Meningkatkan posisi dan fungsi persyarikatan sebagai sumber inspirasi dan rujukan pemikiran baik ke dalam maupun ke luar lingkungan persyarikatan sehingga Muhammadiyah menjadi kekuatan strategis serta tenda besar amal dan bangsa.
4. Mengembangkan ideopolitor (ideologi, politik, dan organisasi) melalui up grading, refreshing, dan pengajian-pengajian atau kajian-kajian pimpinan yang diselenggarakan di semua lini organisasi untuk meningkatkan komitmen, wawasan, dan aksi gerakan Muhammadiyah dalam menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.
5. Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan sekolah-sekolah kader (Madrasah Mu'allimin, Mu'allimat, Pondok Pesantren) dan lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah.
6. Meningkatkan dan mengembangkan model-model pembinaan jama'ah dan paran Muhammadiyah di akar rumput.
7. Meningkatkan upaya-upaya pengorganisasian dan penyebaran kader Muhammadiyah dalam lembaga-lembaga strategis untuk memerankan fungsi pencerahan, pembebasan, pemberdayaan, dan pengembangan tatanan kehidupan yang utama.
8. Menyusun dan memproduksi konsep-konsep pemikiran-pemikiran strategis dalam menghadapi isu-isu, masalah, dan tantangan umat.

G. PROGRAM PERBIDANG

1. Program Bidang Tarjih, Tajdid dan Pemikiran Islam

a. Visi Pengembangan

Berkembangnya fungsi tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam yang mendorong peran Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan yang kritis, dinamis, dan produktif dalam menjawab problem dan tantangan aktual sehingga Islam menjadi sumber pemikiran, moral dan praksis sosial kehidupan umat, bangsa, dan perkembangan global yang kompleks.

b. Program Pengembangan

1. Menyegarkan dan mengembangkan pemahaman dan pengamalan ajaran islam dalam kehidupan masyarakat.
2. Mempertuas dan mensosialisasikan konsep Islami dan produk-produk pemikiran di bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam yang menjadi pandangan, pedoman, bimbingan, acuan, dan tuntunan dalam kehidupan masyarakat.
3. Mengembangkan kapasitas kompetensi kelembagaan dan kader ulama bidang tarjih, tajdid, dan pemikiran Islam termasuk pembinaan kader hisab dan falak serta kelompok pemikir Islam untuk memperkokoh an mengembangkan Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan.
4. Mengembangkan pandangan dan pedoman hisab yang menjadi rujukan bagi masyarakat luas.
5. Mengintensifkan kajian-kajian pemikiran Islamn dalam merespon isu-isu dan masalah-masalah penting dan strategis diberbagai bidang yang berkembang dalam kehidupan.
6. Pengkajian sumber ajaran islam antara lain Pengkajian tafsir Al-Qur'an, Alhadis dan pengkajian tematis tentang masalah actual yang mungkin dapat memunculkan fatwa/pendapat baru.

7. Pembentukan Lajnah Tarjih, Pelatihan kader Tarjih menghidupkan takasus falaqiyah dan takasus fi'ulumiddin

2. Program Bidang Tabligh

a. Visi Pengembangan

Berkembangnya gerakan tabligh Muhammadiyah dalam pembinaan keagamaan yang bersifat meneguhkan dan mencerahkan pada berbagai kelompok sosial yang luas sehingga Islam dihayati, dipahami, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi rahmatan lil-'alamin ditengah-tengah dinamika masyarakat Indonesia yang kompleks.

b. Program Pengembangan

1. Menyusun pedoman-pedoman/tuntunan-tuntunan dan materi tabligh yang bersifat praktis dan menjadi acuan bagi para mubligh serta semakin tumbuhkembangnya kehidupan keagamaan/keislaman dalam masyarakat.
2. Menghidupkan dan mengembangkan berbagai jenis pengajian di lingkungan persyarikatan dan umat Islam disertai pengembangan materi, pendekatan, metode yang menarik dan tepat sasaran yang menghadirkan Islam berwajah rahmatan lil-'alamin.
3. Turut mensosialisasikan keputusan tarjih dan pedoman hidup Islami.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas mubaligh yang dapat menjangkau multistrata, multietnis, dan multimedia di berbagai lingkungan kehidupan masyarakat.
5. Menginventarisasi jumlah mubaligh dan mubalighah yang ada di PDM Pabasko
6. Menginventarisasi jumlah masjid dan muashalla muhammadiyah yang ada di PDM Pabasko.
7. Menerbitkan kartu tanda anggota mubaligh/mubalighah bekerja sama dengan bank nagari.
8. Mengadakan pengajian warga muhammadiyah satu kali dalam sebulan.

9. Mengadakan pengkajian unsur pimpinan arah muhammadiyah satu kali sebulan dan cabang dan ranting satu kali dalam 3 bulan.
10. Turba atau supervisi ke cabang-cabang muhammadiyah bersama PDM untuk menghidupkan cabang sekurang-kurang satu kali dalam satu tahun.
11. Mengadakan pelatihan kader mubaligh/khatib.
12. Mengefetifkan pengelolaan masjid Taqwa Kauman terutama dalam kepengurusan dan jadwal khatib ju' mat, pengajian lainnya termasuk masjid Jihaduwaalidaina dan masjid dan mushalla muhammadiyah lainnya.

3. Program Bidang Pendidikan, Iptek, dan Litbang.

a. Visi Pengembangan

Berkembangnya kualitas dan ciri khas pendidikan Muhammadiyah yang unggul, holistik, dan bertatakelola baik yang didukung oleh pengembangan iptek dan litbang sebagai wujud aktualisasi gerakan dakwah dan tajdid dalam membentuk manusia yang utuh sebagaimana tujuan pendidikan Muhammadiyah.

b. Program Pengembangan

1. Mengembangkan sistem pendidikan Muhammadiyah yang holistik atau menyeluruh sebagai kelanjutan dan konsep blueprint pendidikan Muhammadiyah menuju pada pencapaian pendidikan yang unggul/utama dimasa depan.
2. Menyusun roadmap keunggulan pendidikan Muhammadiyah baik tingkat dasar dan menengah maupun perguruan tinggi dalam berbagai aspeknya, termasuk pemetaan sumberdaya insani, pusat-pusat keunggulan, fasilitas, tata kelola, kepemimpinan, dan lain-lain.
3. Membenahi dan melengkapi administrasi Majelis Dikdasmen.
4. Mengupayakan kantor yang permanen.
5. Melengkapi data guru dan pegawai (SD/Ibtidaiyah SLTP/SLTA).
6. Membenahi kurikulum sesuai dengan KTSP untuk seluruh sekolah.

7. Membuat struktur organisasi Dikdasmen lengkap dengan uraian tugas masing-masing personil.
8. Menguapayakan adanya sekolah yang berstandar nasional
9. Mengajak kepala sekolah mengaktifkan Tapak Suci untuk IRM sebagai kader Muhammadiyah.
10. Bekerjasama dengan majelis pembinaan kader dalam melaksanakan Baitul Arqam dan darul arqam.
11. Menjajaki pendirian SMK Kecil Muhammadiyah untuk Program keahlian Tata Boga dan Tata Busana.

4. Program Bidang Perkaderan

a. Visi Pengembangan

Berkembangnya kualitas anggota dan kader Muhammadiyah sebagai pelaku gerakan yang memiliki keunggulan kapasitas, komitmen ideologis, dan mampu memajukan serta menyebarluaskan peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan umat, bangsa, dan perkembangan global.

b. Program Pengembangan

1. Mengintensifkan pelaksanaan sistem perkaderan Muhammadiyah dan menjadikan perkaderan sebagai budaya organisasi di seluruh tingkatan pimpinan, amal usaha, dan institusi-institusi yang berada dalam struktur Persyarikatan.
2. Mengoptimalkan pendayagunaan pilar-pilar perkaderan di lingkungan persyarikatan yakni di keluarga, organisasi otonom, lembaga pendidikan, dan amal usaha Muhammadiyah.
3. Melaksanakan pengkaderan formal untuk pimpinan berupa Baitul Arqam, Darul Arqam dan latihan instruktur sekurang kurangnya 2 kali dalam satu periode.
4. Memprakarsai terbentuknya korps instruktur pengkaderan Muhammadiyah di tingkat daerah.

5. Mengupayakan transportasi kader, dengan banyak melibatkan dan memberi peran yang proporsional kepada Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) dalam berbagai aktivitas Persyarikatan. Dalam pelaksanaannya majelis kader bekerja sama dengan majelis yang membawahi amal usaha Muhammadiyah.
6. Melaksanakan pengkaderan non formal berupa pelatihan jurnalistik dan pelatihan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan secara berjenjang dari daerah hingga ke ranting.
7. Mengoptimalkan peran perguruan Muhammadiyah sebagai wahana kaderisasi dan pembinaan ideologi Muhammadiyah melalui kerja sama dengan majelis Dikdasmen.
8. Meningkatkan pemahaman anggota dan pimpinan secara intensif terhadap prinsip-prinsip dalam gerakan Muhammadiyah seperti Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Perjuangan Muhammadiyah, pedoman hidup islami warga Muhammadiyah dan pernyataan pikiran Muhammadiyah jelang satu abad baik lisan maupun tulisan.
9. Mendorong pimpinan persyarikatan untuk membuka program sekolah kader, baik dengan optimalisasi peran sekolah, madrasah dan perguruan pendidikan maupun pondok pesantren Muhammadiyah bekerjasama dengan majelis tarjih dan tabligh membentuk forum kajian Tafaqquh Fiddin (seperti kajian alqur'an dan Hadist) disemua tingkat pimpinan.
10. Identifikasi dan pemetaan sumber daya serta pemberdayaan kader yang dimiliki Muhammadiyah disemua lini organisasi, mengadakan pengkaderan formal dengan guru /kajian pada semua bidang lingkungan Muhammadiyah 1 kali periode.
11. Meningkatkan kajian-kajian perkaderan untuk pengembangan konsep, model, pendekatan, dan metode yang lebih berkualitas dalam pelaksanaan perkaderan Muhammadiyah.

5. Program Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Visi Pengembangan

Berkembangnya fungsi pelayanan kesehatan dan kesejahteraan yang unggul dan berbasis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) sehingga mampu meningkatkan kualitas dan kemajuan hidup masyarakat khususnya kaum dhu'afa sebagai wujud aktualisasi dakwah Muhammadiyah.

b. Program Pengembangan

1. Sosialisasi kesehatan pada perguruan muhammadiyah dan para manula.
2. Mengairahkan gerakan anti narkoba melalui FANK.
3. Menyelenggarakan sunatan massal bagi anak warga muhammadiyah PABASKO
4. Melakukan pendataan (data base) masyarakat miskin dan manula PABASKO.
5. Mengoptimalkan kegiatan kepedulian sosial kemasyarakatan sesama anggota Muhammadiyah PABASKO.
6. Meningkatkan kesejahteraan anak /ibu di Panti asuhan 'Aisyiah & Muhammadiyah melalui gerakan peduli kemanusiaan dilingkungan PABASKO.
7. Mendirikan toko obat / apotik muhammadiyah sebagai sumber ekonomi dan kesejahteraan keluarga muhammadiyah dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat.
8. Mengupayakan berdirinya klinik kesehatan Muhammadiyah ditingkat Daerah PABASKO

6. Program Bidang Wakaf

a. Visi Pengembangan

Berkembangnya kemampuan dan pengorganisasian umat untuk berwakaf, berzakat, berinfaq, dan bershadaqah serta meningkatnya system pengelolaan, jalinan kepedulian, dan pelayanan bagi kaum dhu'afa yang menumbuhkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Program Pengembangan



1. Inventarisasi dan arbitrase harta benda Persyarikatan yang diperoleh dari wakaf serta mengintensifkan pelaksanaan, penerbitan, dan pengelolaan dan sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah.

a. Bidang Wakaf

Inventarisasi asset, dengan kegiatan :

1. Registrasi asset tanah (2007)
2. konfirmasi data tanah dengan PCM (2007).
3. Pembuatan program data base tanah (2007)
4. Pembuatan display data tanah (2007).
5. Pemutakhiran data tanah dan bangunan (2008).
6. Inventarisasi asset barang bergerak (2008)

b. Kelembagaan

1. Membuat petunjuk tentang pengelolaan harta wakaf (2007).
2. Mengadakan rapat kerja, pelatihan dan seminar dll.(2008)

c. Arbitrasi

1. Inventarisasi asset yang bermasalah dengan pihak terkait (2007- 2008).
2. Melaksanakan mediasi penyelesaian masalah asset dengan pihak terkait. (2008-2009)

d. Sertifikasi

1. Sertifikasi tanah yang mendesak dan strategis, seperti tanah mes dosen dll. (2007 – 2008).
2. Fasilitasi sertifikat tanah dan surat-surat atas tanah di PCM dan Pimpinan Ranting (2007 – 2010).
3. Penyatuan File Sertifikat Tanah ke PDM (2007-2008)

e. Pengamanan fisik yang belum dipakai

1. Pembuatan plang nama asset tanah hak milik persyarikatan (2007-2008)
2. Sosialisasi kepemilikan tanah asset persyarikatan kepada pihak PEMDA setempat. (2008-2010)

7. Program Bidang Ekonomi dan ZIS (Zakat, Infak, Shadaqah)

a. Visi Pengembangan

Berkembangnya lembaga keuangan Mikro, koperasi, dan BTM/BMT sebagai wadah kerasama dan pemberdayaan antar pelaku usaha ekonomi di lingkungan Persyarikatan.

b. Program Pengembangan

1. Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi umat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis yang intensif dan sistematis.
2. Meningkatkan pembinaan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi umat melalui kegiatan pelatihan, pendampingan, dan konsultasi bisnis yang intensif dan sistematis.
3. Mengembangkan model pemberdayaan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah yang didasarkan atas kekuatan sendiri sebagai wujud cita-cita kemandirian ekonomi umat.
4. Mengembangkan jaringan dan kerjasama dengan pemerintah, swasta, dan lembaga
5. Menghidupkan kembali koperasi matahari di kompleks muhammadiyah yang sudah berbadan hukum.
6. Mengusahakan pendirian sebuah toko / tempat usaha berupa apotek atau usaha dagang lain.
7. Menindak lanjuti status kebun kelapa sawit yang ada di pulau punjung (Kabupaten Dharmasraya).

**KEPUTUSAN
MUSYAWARAH DAERAH KE-40**

TENTANG

**REKOMENDASI MUHAMMADIYAH DAERAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO**

Musyawarah Daerah ke-40 Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto yang berlangsung di Padang Panjang tanggal 26-27 Jumadil Awal atau bertepatan dengan tanggal 30 April-1 Mei 2011, setelah memperhatikan :

1. Sambutan Wakil Walikota Padang panjang.
2. Sambutan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat.
3. Pidato Iftitah Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto.
4. Laporan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto.
5. Pendapat, tanggapan, pendapat, pembahasan, saran dan usul-usul peserta Musyda yang disampaikan dalam sidang pleno dan sidang komisi.

Musyawarah Daerah merekomendasikan hal-hal berikut :

A. Internal

1. Meminta untuk mengembalikan sekretariat PDM dari Mesjid Jihaduwalivalidain ke sekretariat di samping Mesjid Taqwa.
2. Perlu adanya kebijakan yang tegas dalam tata kerja antara PDM, BPKPM dan Badan pengembangan Komplek.
3. PDM diminta untuk menyampaikan perkembangan organisasi kepada Cabang dan Ranting dalam satu forum minimal 1 kali dalam 1 tahun.
4. Perlu dibedakan kembali tata kerja antara Muhammadiyah, Aisyiah, dan ortom lain dengan mengacu kepada AD/RT.

5. Menghimbau pimpinan terpilih agar turun ke Cabang-cabang dengan jadwal yang jelas.
6. Perlu penegasan kembali bahwa PDM adalah pemilik otoritas penuh terhadap kebijakan lembaga pendidikan yang ada di kompleks kauman.
7. Menegaskan kepada pimpinan untuk tidak menjadikan persyarikatan sebagai loncatan untuk kepentingan-kepentingan politik, golongan maupun pribadi.

B. Ekternal

1. Diminta kepada pimpinan untuk mengembangkan kerjasama dengan organisasi sejenis, lembaga pemerintahan setingkat dan organisasi lainnya.
2. Perlu adanya satuan khusus untuk menyiapkan proposal dan mengadakan pendekatan (logi) terhadap lembaga nasional maupun internasional.
3. Mengupayakan lobi yang intensi kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan fasilitas yang diperlukan untuk persyarikatan.
4. Pimpinan diminta untuk memberdayakan potensi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.
5. Memperluas amal usaha produktif, kerjasama dengan investor, seperti apotik, pertokoan dan sebagainya.
6. Meminta pemerintah kota untuk mengeluarkan kebijakan yang tegas terhadap pembinaan remaja, pembrantas pekat, kehidupan Islam, dan menjalankan norma-norma Islam.
7. Melakukan pembicaraan dengan pemerintah Kota agar bisa memasukan ke dalam APBD kota anggaran yang dialokasikan untuk Muhammadiyah.

C. REKTOR UMSB

1. Menghimbau rektor UMSB untuk membuka program Pasca Sarjana di Padan Panjang.
2. Meminta Rektor UMSB bersungguh-sungguh untuk mengembangkan Fakultas Agama Islam dan STKIP dan memasukan unsur PDM dalam BPH_UMSB.

3. Meminta pimpinan FKIP Padang Panjang untuk memberi kontribusi materi guna menungjang aktivitas persyarikatan.
4. Adanya usaha untuk menambah Fakultas/Jurusan baru di FKIP / FAI Padang Panjang.

D. PWM Sumatera Barat

1. Merekomendasikan agar MA KMM kembali menggunakan KMM dan mengukuhkan posisinya sebagai sekolah kader calon pimpinan persyarikatan.

8. Mengusahakan pendirian BMT yang berpusat di Kauman.
9. Memberikan pelatihan kepada masyarakat yang berhubungan dengan kewirausahaan dan lifeskill guna meningkatkan dan memberdayakan ekonomi umat.
10. Melakukan inventarisasi terhadap unit Usaha yang ada.
11. Mendata warga muhammadiyah yang PNS di Pabasko untuk menjadi donator tetap
12. Pengembangan pemanfaatan fungsi pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah ke hal-hal yang lebih produktif selain yang bersifat kedermawanan.
13. Meningkatkan pembinaan dan jaringan lembaga-lembaga ZIS (Zakat, Infaq, Shadaqah) sehingga memiliki fungsi efektif, produktif, dan akuntabel dalam menjalankan kegiatannya.



**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG-BATIPUH-X KOTO**

**SURAT KEPUTUSAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
NO : 04 / KEP / II.O / B / 2011**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA KERJA
MUSYAWARAH DAERAH KE 40 MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Barat No. 59/KEP/II.O/D/2011/ tanggal 06 Rajab 1432 / 08 Juni 2011 tentang penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015;
2. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto, NO : 02 / KEP / III.O / D / 2011, tanggal 18 Syaban 1432 H / 20 Juli 2011 M, tentang penetapan struktur dan Personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015.

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk menjamin adanya peningkatan kinerja, penyegaran dan kaderisasi, pimpinan perlu disusun pedoman dan tata kerja pimpinan sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan;
2. Bahwa Pedoman dan Tata Kerja Pimpinan tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan.

Mengingat

- : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah
2. Keputusan Musyawarah Daerah ke-40 Muhammadiyah Pabasko

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**: KEPUTUSAN PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO TENTANG
PEDOMAN DAN TATA KERJA PIMPINAN DAERAH
MUHAMMADIYAH PABASKO PERIODE 2010-2015**

BAB I KEDUDUKAN

Pasal 1

Pimpinan Daerah memimpin Muhammadiyah dalam Wilayahnya dan melaksanakan kebijakan Pimpinan Pusat.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

Pimpinan Daerah bertugas :

1. Menetapkan kebijakan Muhammadiyah dalam wilayahnya berdasarkan kebijakan Pimpinan Pusat, Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan tingkat Daerah dan Rapat Pimpinan Tingkat Daerah.
2. Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan Pimpinan Pusat dan Unsur Pimpinan.
3. Membimbing, membina dan meningkatkan amal usaha serta kegiatan Daerah dalam wilayahnya sesuai dengan kewenangannya.
4. Membina, membimbing dan mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan kegiatan unsur pembantu pimpinan dan organisasi otonom tingkat daerah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut pada pasal 2, pimpinan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Mentanfidzkan Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan, Rapat Pimpinan dan Rapat kerja Pimpinan, serta Rapat Kerja Unsur Pembantu Pimpinan tingkat Daerah.
2. Menetapkan Rencana kegiatan Persyarikatan berdasarkan Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan, dan Rapat Pimpinan Tingkat Daerah.

BAB III PRINSIP KERJA

Pasal 4

Pimpinan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu berpedoman pada prinsip-prinsip berikut :

1. Berpedoman kepada landasan gerak Muhammadiyah, yaitu Al-qur'an dan sunah, Muqadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-cita hidup Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Pedoman hidup Islami warga

Muhammadiyah, dan Kittah Muhammadiyah serta pemikiran-pemikiran lainnya yang menjadi dasar nilai dan norma gerakan.

2. Memelihara tradisi berorganisasi yang selama ini menjadi khasanah, kearifan, warga dan pimpinan Muhammadiyah, seperti pemaaf, ramah, moderat, dll.
3. Menjalankan Keputusan Musyawarah ke-40, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam persyarikatan.
4. Berorientasi pada kerja sebagai wujud prestasi, sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditentukan, serta amanah dalam menepati janji.
5. Istiqmah dalam melaksanakan Komitmen Moral Anggota Pimpinan Daerah yang telah ditandatangani oleh seluruh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko periode 2010-2015 secara amanah dan konsisten.
6. Menjalankan dan memelihara sistem Pimpinan kolektif-kolegial dengan mengikuti tata kerja, serta menjaga kekompakan, ukhuwah Islamiyah, dan produktifitas kerja dalam menjalankan kepemimpinan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pabasko periode 2010-2015.
7. Melaksanakan kepemimpinan dengan tiga fungsi penting secara komplementer / terpadu yaitu menjalankan kebijakan hasil Musyawarah Daerah dan misi gerakan, memainkan peran-peran strategis keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, dan melakukan pelayanan-pelayanan organisasi/warga persyarikatan.

BAB IV SUSUNAN DAN PERSONALIA

Pasal 5

Pimpinan Daerah terdiri dari 13 orang hasil Musyawarah Daerah ke-40 merupakan kesatuan kolektif dengan susunan dan personalia sebagai berikut :

SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO PERIODE 2010-2015

Ketua	: Drs. Fahrizal Alwis
Wakil Ketua	: Syafril Alwis, S.Ag
Wakil Ketua	: Dr. H. Adirozal, M.Si
Wakil Ketua	: Indramadi, S.Ag
Wakil Ketua	: Drs. H. Harmaini, L.MM
Wakil Ketua	: Drs. Sunar TS
Wakil Ketua	: Musriadi Musanif, S.Th.I
Wakil Ketua	: H. Mirdas Iliyas, S.Ag
Sekretaris	: Drs. Zulkarnain Harun, M.Si
Wakil Sekretaris	: Zulfiadi Hutabarat, S.Ag, MSI
Wakil Sekretaris	: Joni Nasri, S.Ag

Bendahara : Abdul Gafar, S.Ag
Wakil Bendahara : Daprial Anwar, S.Ag

BAB V PEMBAGIAN TUGAS

Pasal 6

Pimpinan Daerah merupakan kesatuan yang bulat dan tersistem dalam organisasi. Pembagian tugas dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan tugas dan fungsi. Oleh karena itu untuk menjaga kewibawaan dan keharmonisan kerja sama, Pimpinan Daerah dalam menjalankan tugasnya wajib melakukan dan memelihara hubungan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara terus menerus.

Oleh karena itu agar efisiensi dan efektifitas kerja dapat berlangsung dengan baik dan teratur, disepakati pembagian tugas masing-masing anggota pimpinan Daerah, sebagai berikut :

1. KETUA (Drs. Fahrizal Alwis)

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pimpinan Daerah serta mengarahkan, membimbing dan mengendalikan pelaksanaan Program Kerja Tahunan.
- b. Mengkoordinasikan anggota pimpinan daerah lainnya dalam melaksanakan tugas masing-masing.
- c. Mewakili Pimpinan Daerah ke dalam dan keluar persyarikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Menanda tangani surat-surat keluar dan mendisposisikan surat-surat masuk

2. WAKIL KETUA (Musriadi Musanif, S.Th.I)

1. Membantu tugas Ketua yang bersifat umum dan atau sesuai dengan pendelegasian dari ketua.
2. Mengkoordinir Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Mengkoordinasikan bidang Dikdasmen dalam mempelancar proses pembelajaran, baik dalam PDM maupun dalam dinas instansi terkait

3. WAKIL KETUA (Drs. Sunar TS)

- a. Membantu tugas Ketua yang bersifat umum dan atau sesuai dengan pendelegasian dari ketua.
- b. Meningkatkan pemberdayaan secara fungsional bidang organisasi dan manajemen persyarikatan.
- c. Mengkoordinasikan tugas-tugas :
 1. Pembinaan dan pengembangan fungsi Masjid Taqwa dan Pengembangannya.
 2. Majelis Kesejahteraan Masyarakat dan Kesehatan.
 3. Bidang Humas dan Dokumentasi.

WAKIL KETUA (Drs. H. Harmaini, L.MM)

- a. Membantu tugas Ketua yang bersifat umum dan pendelegasian dari ketua.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis wakaf dan Ket

an

WAKIL KETUA (H. Mirdas Iliyas, S.Ag)

- a. Membantu tugas Ketua yang bersifat umum dan atau pendelegasian dari ketua.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis Tarjih dan Tajdid

WAKIL KETUA (Dr. H. Adirozal, M.Si)

- a. Membantu tugas Ketua yang bersifat umum dan atau sesuai dengan pendelegasian dari ketua.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis Ekonomi
- c. Membentuk dan Mengembangkan kelompok kerja ekonomi Muhammadiyah .
- d. Mengkoordinir pengembangan jiwa kewirausahaan anggota persyarikatan.
- e. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- f. Merealisasi kerjasama Kebun kelapa sawit di Sijunjung

WAKIL KETUA (Indramadi, S.Ag)

- a. Membantu tugas Ketua yang bersifat umum dan atau sesuai dengan pendelegasian dari ketua.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis Kader

WAKIL KETUA (Syafri Alwis, S.Ag)

- a. Membantu tugas Ketua yang bersifat umum dan atau sesuai dengan pendelegasian dari ketua.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas majelis Tabligh dan Dakwah Khusus.

SEKRETARIS (Drs. Zulkarnain Harun, M.Si)

- a. Membantu tugas-tugas Ketua dalam menggerakkan organisasi secara rutin dan berkesinambungan.
- b. Bertanggung jawab mengendalikan informasi masukan dan pemberitaan yang diperlukan persyarikatan.
- c. Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan Daerah serta penyelesaian realisasi keputusan yang diambil.
- d. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan secara fungsional bidang Sekretariat PDM.
- e. Menyusun Program Kerja Tahunan Pimpinan Daerah Muhammadiyah.
- f. Menyusun Laporan Tahunan, Musyda, Musywil
- g. Menetapkan Surta-surat Keputusan Pimpinan Daerah.

WAKIL SEKRETARIS (Zulfiadi Hutabarat, S.Ag, MSI)

- a. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi hubungan kedalam.
- b. Membantu mengkordir tugas-tugas Sekretariat dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan Daerah serta penyelesaian realisasi keputusan yang diambil.
- c. Menghimpun dan menyusun dokumentasi serta inventaris kekayaan Pimpinan Daerah bidang majelis Ekonomi, majelis Kesejahteraan Masyarakat dan Kesehatan, Majelis Dikdasmen, serta Pendidikan Kader
- d. Membina Sekretariat Ortom Tingkat Daerah.
- e. Mengkoordinir Kegiatan Kesekretarian Bidang Majelis Kesehatan, dan Kesejahteraan Masyarakat, Majelis Dikdasmen dan Majelis Pendidikan Kader

WAKIL SEKRETARIS (Joni Nasri, S. Ag)

- a. Bertanggungjawab dalam bidang administrasi hubungan kedalam.
- b. Membantu mengkoordinir tugas-tugas Sekretariat dalam mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Pimpinan Daerah serta penyelesaian realisasi keputusan yang diambil.
- c. Menghimpun dan menyusun dokumentasi serta inventaris kekayaan Pimpinan Daerah bidang Majelis Wakaf dan ZIS, Majelis Tarjih dan Tajdid dan Majelis Tabligh.
- d. Membina Sekretariat Ortom Tingkat Daerah.
- e. Mengkordinir kegiatan Kesekretarian Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Tarjih dan Tajdid serta Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus.

BENDAHARA (Abdul Gafar, S.Ag)

- a. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan pembukuan keuangan Pimpinan Daerah serta berusaha untuk mendapatkan sumber-sumber keuangan .
- b. Menyusun Rencana Anggaran pendapatan dan belanja tahunan Pimpinan Daerah Muhammadiyah
- c. Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan pimpinan daerah
- d. Bekerjasama dengan wakil sekretariat dalam menyusun inventaris kekayaan pimpinan daerah

3. WAKIL BENDAHARA (Daprial Anwar, S.Ag)

- a. Membantu tugas-tugas bendahara yang dilakukan oleh Bendahara.

4. SEKRETARIS EKSEKUTIF (ROMI):

- a. Membantu tugas-tugas ketua yang bersifat umum dan atau sesuai dengan pendelegasian wewenang dari ketua
- b. Melayani administrasi majelis-majelis pada PDM

- c. Membantu sekretaris mengetik dan mengantar surat-surat untuk anggota persyrikan

BAB VI TATA HUBUNGAN

Pasal 7

1. Ketua wakil ketua sekretaris dan wakil sekretaris, sekretaris eksekutif, bendahara dan anggota merupakan satu kesatuan bulat yang utuh dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara efektif dengan pola manajemen terbuka
2. Fungsi ketua dan wakil ketua, dalam hal menggerakkan roda organisasi termasuk mengaktifkan tugas-tugas sekretaris dan bendahara secara terpadu
3. Dalam melaksanakan fungsinya masing-masing, ketua dan wakil ketua menjalin kerjasama yang harmonis dengan sesamanya dan dengan sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara
4. Dalam hal koordinasi kedalam dan keluar seluruh anggota pimpinan daerah harus memelihara hubungan yang harmonis dalam nuansa musyawarah untuk tegaknya ukhuwah islamiah

BAB VII KANTOR SEKRETARIAT

Pasal 8

1. Kantor Pimpinan Daerah merupakan pusat penyelenggaraan kegiatan pimpinan daerah khususnya kegiatan administrasi dan informasi
2. Alamat kantor pimpinan daerah muhammadiyah PABASKO di samping Mesjid Taqwa Muhammadiyah Padangpanjang
3. Kantor Sekretariat Pimpinan Daerah, dipimpin langsung oleh Sekretaris
4. Kerja sekretaris dibantu oleh wakil sekretaris dan sekretariat eksekutif
5. Keberadaan Sekretariat eksekutif, bertujuan untuk mewujudkan pola sentralisasi manajemen perkantoran yang meliputi administrasi organisasi maupun keuangan Pimpinan Daerah beserta badan-badan pembantunya

BAB VIII SURAT-SURAT

Pasal 9

1. Semua surat-surat yang masuk dan keluar dicatat dengan tertib melalui Sekretariat Pimpinan Daerah.
2. Semua anggota Pimpinan Daerah yang secara langsung menerima surat-surat organisasi mencatatkan surat tersebut pada sekretariat sesuai tata cara yang ditentukan.

Surat-surat yang masuk hanya dapat dibuka oleh sekretaris atau wakil sekretaris atau petugas yang ditunjuk, kemudian surat-surat tersebut setelah diagendakan dan didisposisi oleh sekretaris atau wakil sekretaris diteruskan kepada ketua atau wakil ketua dan diteruskan kepada yang terkait sesuai permasalahannya.

Semua surat Pimpinan Daerah ditanda tangani oleh ketua bersama sekretaris, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dalam hal ketua berhalangan atau dalam bidang yang terkait surat-surat dapat ditanda tangani oleh wakil ketua menurut bidang tugasnya.
- b. Dalam hal sekretaris berhalangan, surat-surat dapat ditanda tangani oleh Wakil Sekretaris.

Surat-surat Pimpinan Daerah yang mengenai keuangan dan perbendaharaan, ditanda tangani oleh ketua atau wakil ketua bersama bendahara atau wakil bendahara. Dalam hal bendahara atau wakil bendahara berhalangan, surat-surat ditanda tangani oleh ketua atau wakil ketua bersama sekretaris atau wakil sekretaris.

Surat-surat yang bersifat rutin (seperti undangan rapat yang sudah dijadwalkan) dapat ditanda tangani oleh sekretaris atau wakil sekretaris.

Surat-surat yang dikeluarkan oleh unsur Pembantu Pimpinan kepada institusi di luar persyarikatan harus diketahui oleh ketua atau wakil ketua sesuai dengan bidangnya dan arsipnya ada pada sekretariat Pimpinan Daerah.

Surat-surat keluar Pimpinan Daerah menggunakan penanggalan Hijriah dan Miladiyah.

BAB IX

Pasal 10

Rapat-rapat Pimpinan Daerah terdiri dari :

1. Rapat Pleno
2. Rapat Pleno Lengkap.

Pasal 11

Rapat Pleno

1. Rapat Pleno adalah Rapat Pimpinan Daerah yang pesertanya terdiri dari seluruh anggota Pimpinan Daerah 13 orang. Diadakan secara reguler, sekurang-kurangnya 2 Minggu sekali atau menurut keperluan.
2. Rapat Pleno berfungsi sebagai forum pembahasan dan musyawarah pengambilan keputusan Pimpinan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya yang berkenaan dengan :
 - a. Tanfidz Keputusan Musyawarah Daerah, Musyawarah Pimpinan, Rapat Pimpinan Tingkat Daerah dan Rapat kerja Pimpinan serta Rapat Kerja unsur pembantu Pimpinan tingkat Daerah dan Rapat Kerja Organisasi Otonom.
 - b. Perencanaan kegiatan dan atau kebijaksanaan startegis serta evaluasi pelaksanaannya.
 - c. Pemecahan masalah mendasar tentang persyarikatan dan kepemimpinannya.

- d. Penentuan sikap Muhammadiyah yang berdampak luas pada masyarakat, bangsa dan umat.
- e. Rapat Pleno dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.

Pasal 12

Rapat Pleno Lengkap

Rapat Pleno Lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Pimpinan Daerah dan Ketua Majelis atau Lembaga Ex Officio serta ketua organisasi otonom Ex Officio tingkat Daerah serta ketua Pimpinan Daerah Ex Officio.

Rapat Pleno Lengkap diadakan 3 bulan sekali atau menurut keperluan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.

Rapat Pleno Lengkap adalah rapat informatif dan koordinatif untuk tujuan melancarkan jalanya pimpinan dalam segala aspeknya serta menerima usulan dan masukan untuk menetapkan kebijaksanaan.

Pasal 13

Penutup

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan harus menjadi acuan bagi seluruh anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padang Panjang Batipuh X Koto periode 2010-2015 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Apabila ternyata dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diubah, disempurnakan sebagaimana mestinya.

Nashrun Minallah Wa fathun Qariib

Ditetapkan di : Padang Panjang

Pada tanggal : 09 Dzulkaedah 1432 H
07 Oktober 2011 M

**PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO**

Ketua

Sekretaris

Drs. FAHRIZAL ALWIS
NKTAM : 566626

Drs. ZULKARNAIN HARUN, M.Si
NKTAM. 927957

**STRUKTUR MAJELIS
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2010-2015**

1

**STRUKTUR DAN PERSONALIA
MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH PABASKO
PERIODE 2010-2015**

	Koordinator	: Musriadi Musanif, S.Th.I
	Ketua	: Drs. Amel Dahlan
	Wakil Ketua	: Alfiar, M.Pd
	Sekretaris	: Yurmitanto
	Anggota	: Surya Eka Prianan, ST
		: Drs. Harisman, M.Si
		: Drs. Erichiyat Putra

**STRUKTUR DAN PERSONALIA
MAJELIS PELAYANAN SOSIAL DAN KESEHATAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2010 – 2015**

Koordinator	: Drs. Sunar. TS
Ketua	: dr. H. Mawardi, M.Kes
Wakil Ketua	: Suharman, S.Ag
Sekretaris	: Drs. Syahrul
Anggota	: Drs. Nuryanuwar, Apt. MM. M.Kes
	: Agus Salim, S.Pd.I

**STRUKTUR DAN PERSONALIA
MAJELIS WAKAF DAN KEHARTABENDAAN
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2010 – 2015**

Koordinator	: Drs. H. Harmaini L.MM
Ketua	: H. Afrizal
Wakil Ketua	: D. Dt. Sinaro Mudo, S.Pd.I
Sekretaris	: Buchari, Dt. Lelo Marajo, S.Th.I
Anggota	: Erizal, S.Pd.I
	: Nasril Dt. Tanbaro, S.Pd
	: Sukniadi

**STRUKTUR DAN PERSONALIA
MAJELIS TARJIH DAN TAJDID
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2010 – 2015**

Koordinator	: Drs. H. Mirdas Iliyas
Ketua	: Gusharya Putra, S.Ag, MA.
Wakil Ketua	: Zuriadi, S.Pd.I
Sekretaris	: Zulkifli, S.Ag. MA
Anggota	: Ade Sehabuddin, SH, MM
	: Wahyu Salim, S.Ag

**STRUKTUR DAN PERSONALIA
MAJELIS EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2010 – 2015**

Koordinator	: Dr. H. Adirozal, M.Si
Ketua	: H. Erwan Yunus, SE
Wakil Ketua	: Drs. Syamsul Anwar, MM
Sekretaris	: Yuska Putra, S.Pd
Anggota	: Erianto, S.Pd
	: Suheri, S.Pd.I
	: Hendriko

**STRUKTUR DAN PERSONALIA
MAJELIS PENDIDIKAN KADER
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2010 – 2015.**

Koordinator	: Indra Mahdi, S.Ag
Ketua	: Jupagni, S.Pd. M.Ag
Wakil Ketua	: Nova Indra
Sekretaris	: Suharjiman, S.Pd ✓
Anggota	: Brianto, S.Pd
	: Suharman ?
	: Azwar Hadi ✓

**STRUKTUR DAN PERSONALIA
MAJELIS TABLIGH DAN DAKWAH KHUSUS
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
PADANG PANJANG BATIPUH X KOTO
PERIODE 2010 – 2015**

Koordinator	: Syafril Alwis, S.Ag
Ketua	: Hasanuddin, S.Ag
Wakil Ketua	: Rafles Dt. Mangkuto Nan Itam
Sekretaris	: Arab Mustakribah, S.Pd.I
Anggota	: Drs. H.M. Taher Hanif, MA
	: Syafnal, S.Ag
	: Chandra Yuheri, SPd.I